



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2018-2023



RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dirumuskan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu: **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**. Dengan demikian Renstra Perubahan diharapkan menjadi pedoman Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya serta salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Makassar,

SEKRETARIS DAERAH PROV. SULSEL,

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19650405 199010 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1 Struktur Organisasi dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	7
2.1.1 Struktur Organisasi.....	7
2.1.2 Tugas dan Fungsi.....	8
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ..	40
2.2.1. Sumber Daya Manusia	40
2.2.2. Sarana dan Prasarana	44
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	52
2.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	73
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	86
2.5.1. Tantangan (<i>Threats</i>) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	86
2.5.2 Peluang (<i>Opportunities</i>) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	87
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	89
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	89



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

	3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	98
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Sekretariat Daerah	112
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	120
	3.5. Penentuan Isu Strategis	121
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	127
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	127
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	135
	5.1. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	135
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	150
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	190
BAB VIII	PENUTUP	222



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	41
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	42
Tabel 2.3	Jumlah Jabatan Struktural Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	42
Tabel 2.4	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	43
Tabel 2.5	Jumlah Aparatur berdasarkan golongan usia	44
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan	44
Tabel 2.7	Daftar Inventaris Aset tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
Tabel 2.8	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	53
Tabel 2.9	(T.C.24) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	74
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	92
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	100
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	113
Tabel 3.4	Identifikasi isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	122
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	129
Tabel 5.1	Analisis S.W.O.T.	135
Tabel 5.2	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	140
Tabel 5.3	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	144



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	152
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	191
Tabel 7.2.	Tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung oleh Sekretariat Daerah	194
Tabel 7.3	(t.c. 28) Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	196
Tabel 7.4	(T-C.28) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	219



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.. 7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengalami perubahan karena tidak sesuai lagi dengan kebijakan nasional dan kondisi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

yang terjadi saat ini, Urgensi perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 40).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

1. Sebagai arah kebijakan dan Pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sebagai dasar penilaian kinerja baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 Sebagai acuan penyusunan Dokumen perencanaan tahunan lainnya.
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
4. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah;
6. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Setiap Tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- 1) Unsur Pimpinan : Sekretaris Daerah (Sekda);
 - 2) Unsur Pembantu :
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - i) Biro Otonomi dan Pemerintahan Daerah;
 - ii) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - iii) Biro Hukum.
 - b) Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - i) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 - ii) Biro Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - i) Biro Organisasi dan Tata Laksana;
 - ii) Biro Umum; dan
 - iii) Biro Administrasi Pimpinan.
 - 3) Staf Ahli:
 - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- C. Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- D. Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- E. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekda.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Adapun rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

a) Bagian Pemerintahan, meliputi:

- 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
- 2) Subbagian Fasilitas Penataan Wilayah; dan
- 3) Subbagian Pemerintahan Umum.

b) Bagian Otonomi Daerah, meliputi:

- 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
- 3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, meliputi:

- 1) Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 2) Subbagian Kerja Sama; dan
- 3) Subbagian Tata Usaha Biro.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

a) Bagian Bina Mental Spiritual, meliputi:

- 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
- 2) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan
- 3) Subbagian Tata Usaha Biro

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, meliputi:

- 1) Subbagian Pendidikan;
- 2) Subbagian Kesehatan; dan
- 3) Subbagian Sosial, Infrastruktur, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, meliputi:

- 1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- 2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
- 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

3. Biro Hukum

a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, meliputi:

- 1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi;
- 2) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Peraturan Gubernur, dan Naskah Hukum Lainnya; dan
- 3) Subbagian Produk Hukum Penetapan Keputusan Gubernur.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- b) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - 2) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - 3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
- c) Bagian Bantuan Hukum, meliputi:
 - 1) Subbagian Litigasi;
 - 2) Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - a) Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi, meliputi:
 - 1) Subbagian Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Keuangan;
 - 2) Subbagian Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
 - b) Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi:
 - 1) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perekonomian Sumber Daya Alam.
 - c) Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi:
 - 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
 - 3) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa
 - a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, meliputi:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, dan/Atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
- d. Asisten Administrasi
 - 1. Biro Organisasi dan Tata Laksana
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meliputi:
 - 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Subbagian Analisis Jabatan.
 - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, meliputi:
 - 1) Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - 2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Subbagian Budaya Kerja.
 - c) Bagian Tatalaksana, meliputi :
 - 1) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Pelayanan Publik; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
 - 2. Biro Umum
 - a) Bagian Rumah Tangga, meliputi:
 - 1) Subbagian Urusan Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Subbagian Urusan Dalam; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Perjalanan.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, meliputi:
 - 1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi;
 - 2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - 3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan, Pemeliharaan Aset dan Pengelolaan Kendaraan.
 - c) Bagian Tata Usaha, meliputi:
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
 - 2) Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

3. Biro Administrasi Pimpinan

- a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, meliputi:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro
- b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, meliputi:
 - 1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - 2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan
- c) Bagian Protokol, meliputi:
 - 1) Subbagian Acara;
 - 2) Subbagian Tamu; dan
 - 3) Subbagian Hubungan Keprotokolan

e. Jabatan Fungsional.

A. Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, fungsi Sekretariat Daerah adalah :

- a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsinya.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, serta



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

pelayanan administratif sesuai dengan pembidangan tugas. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Biro Hukum.

1. Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerja sama, dan menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, fasilitasi penataan wilayah, dan pemerintahan umum, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas.

- Subbagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan.
- Subbagian Fasilitasi Penataan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang fasilitasi penataan wilayah.
- Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam menyiapkan bahan penyusunan,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum.

2) Bagian Otonomi Daerah

Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedaan tugas.

- Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan.
- Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerja sama, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Subbagian Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kerja sama.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas, membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Pemerintahan melaksanakan fungsi:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- a) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut.

1) Bagian Bina Mental Spiritual

Bagian Bina Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang sarana dan prasarana.

- Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Mental Spiritual dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang sarana dan prasarana spiritual.
- Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Mental Spiritual dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kelembagaan bina spiritual.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Mental Spiritual, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam, melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.

- Subbagian Pendidikan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pendidikan.
- Subbagian Kesehatan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kesehatan.
- Subbagian Sosial, Infrastruktur, Ketentraman, dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang sosial, infrastruktur, ketentraman, dan ketertiban umum.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III, serta pelaksanaan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.

- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I yang meliputi bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II yang meliputi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja.
- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

dasar III yang meliputi bidang komunikasi, informatika, persandian dan perhubungan.

3. Biro Hukum

Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas. Kepala Biro Hukum menjalankan fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro hukum terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut.

1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, penyusunan produk hukum peraturan gubernur dan naskah hukum lainnya, produk hukum penetapan keputusan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

gubernur, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi
- Subbagian Penyusunan Produk Hukum Peraturan Gubernur, dan Naskah Hukum Lainnya, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang penyusunan produk hukum Peraturan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya.
- Subbagian Produk Hukum Penetapan Keputusan Gubernur dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang produk hukum penetapan keputusan gubernur.

2) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan Kabupaten/Kota dalam



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang produk hukum daerah wilayah I.

- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang produk hukum daerah wilayah II.
- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang produk hukum daerah wilayah III.

3) Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Litigasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang litigasi.
- Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang litigasi dan hak asasi manusia.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bantuan Hukum dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Hukum.

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah, penyusunan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa, serta pelayanan administratif sesuai dengan pembidangan tugas. Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjalankan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- b. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan Kebijakan Daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- b) Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- c) Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- d) Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

1) Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi

Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi dan kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing usaha kecil dan menengah, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang analisis ekonomi dan kelembagaan keuangan.
- Subbagian Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing usaha kecil dan menengah/industri kecil menengah.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

2) Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang sarana perekonomian, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dan perekonomian sumber daya alam, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang sarana perekonomian sektoral, infrastruktur, dan pengembangan wilayah.
- Subbagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah.
- Subbagian Perekonomian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang perekonomian sumber daya alam.

3) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

pembangunan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas.

- Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan.

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa

Biro Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- b) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- c) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- d) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari 3 (bagian) yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas.

- Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah terkait pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa.
- Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa.

2) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik.
- Subbagian Pengembangan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengembangan sistem informasi.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa.

3) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pendampingan konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas.

- Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah terkait pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, dan melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- Subbagian Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah terkait pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah terkait pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

D. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan, serta pelayanan administratif sesuai dengan pembedaan tugas. Asisten Administrasi menjalankan fungsi:

- a. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- b. penyusunan Kebijakan Daerah di bidang umum dan administrasi pimpinan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pengadaan organisasi;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- g. pengoordinasian dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Administrasi membawahi:

1. Biro Organisasi
2. Biro Umum.; dan
3. Biro Administrasi Pimpinan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

1. Biro Organisasi

Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas. Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- b) penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- c) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- d) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
- e) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas; dan
- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Organisasi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Kelembagaan Provinsi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kelembagaan provinsi.
- Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kelembagaan kabupaten/kota.
- Subbagian Analisis Jabatan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang analisis jabatan.

2) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam menyiapkan bahan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang reformasi birokrasi.

- Subbagian Akuntabilitas Kinerja dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang akuntabilitas kinerja.
- Subbagian Budaya Kerja dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang budaya kerja.

3) Bagian Tata Laksana

Bagian Tatalaksana dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Tatalaksana Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tatalaksana dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang tatalaksana pemerintahan.
- Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tatalaksana dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah di bidang pelayanan publik.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha Biro, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Organisasi.

2. Biro Umum

Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Umum menjalankan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum;
- b) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum;
- c) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Biro Umum terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

1) Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga pimpinan, urusan dalam, dan administrasi perjalanan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Rumah Tangga Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Rumah Tangga dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Subbagian Urusan Dalam dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Rumah



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tangga dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang urusan dalam.

- Subbagian Administrasi Perjalanan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Rumah Tangga dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang administrasi perjalanan dinas pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur), Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah), dan Staf Ahli Gubernur, serta pejabat (Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, dan Fungsional) pada Biro Umum.

2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, dan pengelolaan kendaraan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.

- Subbagian Keuangan dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang keuangan dan verifikasi.
- Subbagian Akutansi dan Penatusahaan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang akutansi dan penatusahaan aset.
- Subbagian Penggunaan, Pengamanan, Pemeliharaan Aset, dan Pengelolaan Kendaraan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Admnistrasi Keuangan dan Aset dalam menyiapkan bahan penyusunan,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang penggunaan, pengamanan, pemeliharaan aset, dan pengelolaan kendaraan.

3) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, Sekretariat Daerah, dan staf ahli, persuratan dan srsip, dan tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan bidang tata usaha pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Gubernur.
- Subbagian Persuratan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi bidang persuratan dan arsip.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha Biro, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Umum.

3. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian, materi dan komunikasi pimpinan, dan protokol, serta menyelenggarakan pelayanan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

administratif sesuai pembedangan tugas. Kepala Biro Administrasi Pimpinan menjalankan fungsi:

- a) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian, materi dan komunikasi pimpinan, dan protokol, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian, materi dan komunikasi pimpinan, dan protokol, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- c) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Biro Administrasi Pimpinan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha biro, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang perencanaan dan kepegawaian.
- Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang kepegawaian.
- Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

dan Kepegawaian dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Biro Administrasi Pimpinan.

2) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

- Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi bidang penyiapan materi pimpinan.
- Subbagian Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi bidang komunikasi pimpinan.
- Subbagian Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan dalam mengoordinasikan kegiatan, serta melakukan pelayanan administrasi bidang dokumentasi Pimpinan.

3) Bagian Protokol

Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Subbagian Acara dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang acara.
- Subbagian Tamu dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang tamu.
- Subbagian Hubungan Keprotokolan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Daerah dan pelayanan bidang hubungan keprotokolan.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kondisi sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung lainnya yang dimiliki. Kondisi sumber daya manusia sebagai pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sumber Daya Manusia adalah sumber daya aparatur yang secara kuantitas dan kualitas dapat berfungsi optimal mendukung organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan data bulan Oktober Tahun 2020, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur (pegawai) sebanyak 499 (*Lima Ratus*) orang yang terdiri dari 246 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam*) orang laki-laki dan 253 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga*) orang perempuan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN									
		Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	Fungsional Pelaksana (Staf)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekertaris Daerah	1									
2	Asisten			3							
3	Staf Ahli			5							
4	Biro Pemerintahan Daerah			1		1	2	4	4	3	
5	Biro Kesejahteraan Rakyat			1		2	1	4	5	1	1
6	Biro Hukum			1		2	1	3	6	0	0
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				1	3		3	6	1	
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa				1	2	1	4	5	35	10
9	Biro Organisasi				1	2	1	3	6	3	3
10	Biro Umum			1		1	1	6	3	5	5
11	Biro Administrasi Pimpinan				1		3	5	4	3	9
TOTAL		1		12	4	13	10	32	39	51	28
										154	163

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, SDM yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam. Jumlah SDM Sekretariat Daerah per Oktober 2020 sebanyak 507 orang, jumlah Laki-laki 263 orang atau 52%, dan Perempuan sebanyak 244 orang atau sebesar 48 % yang kompetensinya untuk Eselon I dijabat oleh Sekretaris Daerah, Eselon II diduduki oleh 3 (tiga) orang Asisten, 14 (empat belas) Staf Ahli dan 8 (delapan) orang Kepala Biro, Eselon III diduduki oleh 23 (dua puluh tiga) orang Kepala Bagian, dan Eselon IV diduduki oleh 72 (tujuh puluh dua) orang Kepala Sub Bagian.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN					Fungsional Pelaksana (Staf)
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	
1	Sekertaris Daerah	1					
2	Asisten		3				
3	Staf Ahli		5				
4	Biro Pemerintahan Daerah		1	3	8	1	35
5	Biro Kesejahteraan Rakyat		1	3	9	2	35
6	Biro Hukum		1	3	9		25
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		1	3	9	1	29
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa		1	3	9	45	13
9	Biro Organisasi		1	3	9	3	21
10	Biro Umum		1	2	9	10	118
11	Biro Administrasi Pimpinan		1	3	9	11	47
TOTAL		1	16	23	71	73	323

Sedangkan jumlah Sumber Daya Aparatur berdasarkan pangkat/golongan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Jabatan Struktural Pada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekertaris Daerah				1	1
2	Asisten				3	3
3	Staf Ahli				5	5
4	Biro Pemerintahan Daerah	1	3	30	14	48
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	3	38	8	50
6	Biro Hukum		1	32	5	38
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		7	27	9	43
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1	2	53	15	71
9	Biro Organisasi		1	25	11	37
10	Biro Umum	4	49	71	16	140
11	Biro Administrasi Pimpinan		4	58	9	71
TOTAL		7	70	334	96	507

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 507 orang ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 263 orang (52 %) adalah laki-laki dan 244 orang (48 %) adalah perempuan. selain itu dari tabel diatas juga tergambar jumlah PSN Golongan I sebanyak 7 orang (1,38 %), Golongan II sebanyak



70 orang (13,81%), Golongan III sebanyak 334 orang (65,88 %), dan Golongan IV sebanyak 96 orang (18,93 %). Dari data tersebut tergambar bahwa ASN Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan di domoninasi oleh Golongan III namun jika dibandingkan dengan jumlah eselon dan golongan terdapat biro pejabat eselon IV diduduki oleh pangkat golongan III dan ada juga golongan IV menduduki jabatan staf.

Selanjutnya total jumlah PNS per biro terlihat bervariasi, Jumlah ASN terbesar pada Biro Umum sebesar 140 Orang dan terkecil pada biro Hukum sebesar 38 orang dari data ini tercermin penempatan ASN pada sekretariat daerah belum berdasar beban kerja. Penggolongan Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan secara keseluruhan pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Sekertaris Daerah	1						
2	Asisten	1	2					
3	Staf Ahli	2	3					
4	Biro Pemerintahan Daerah	1	23	19	2	2	1	
5	Biro Kesejahteraan Rakyat		14	28	3	5		
6	Biro Hukum		12	24	1	1		
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1	9	22	1	10		
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa		20	43	2	5		1
9	Biro Organisasi	1	16	15	2	3		
10	Biro Umum	1	18	60	6	39	11	5
11	Biro Administrasi Pimpinan		15	46	3	7		
TOTAL		8	132	257	20	72	12	6

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) dan magister sarjana (S2) yaitu sejumlah 389 orang atau sebesar 76,73 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 2.5 Jumlah Aparatur berdasarkan golongan usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)			
		20-35	36-40	41-50	>50
1	Sekertaris Daerah				1
2	Asisten				3
3	Staf Ahli				5
4	Biro Pemerintahan Daerah	10	7	16	15
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	21	19
6	Biro Hukum	13	6	11	8
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	7	20	13
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6	11	38	16
9	Biro Organisasi	7	8	7	15
10	Biro Umum	20	22	54	44
11	Biro Administrasi Pimpinan	30	8	19	14
TOTAL		91	77	186	152

Berdasarkan data statistik pegawai tersebut nampak bahwa 29,98 % pegawai akan memasuki masa pensiun dalam kurun waktu 1 - 8 tahun mendatang dan akan mengalami loss generation apabila selama kurun itu tidak ada penambahan pegawai baru. Tentu saja penyelesaian tugas menjadi tidak maksimal apabila tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai. Selain itu peran penataan personel juga menjadi vital untuk bisa mempersiapkan kader dan mengisi jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi pemerintahan.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN										
		Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)		Fungsional Pelaksana (Staf)
		L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekertaris Daerah	1										
2	Asisten		3									
3	Staf Ahli		5									
4	Biro Pemerintahan Daerah	1			1	2	4	4	3		15	18
5	Biro Kesejahteraan Rakyat		1		2	1	4	5	1	1	12	23
6	Biro Hukum		1		2	1	3	6	0	0	13	12
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			1	3		3	6	1		13	16
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa			1	2	1	4	5	35	10	8	5
9	Biro Organisasi			1	2	1	3	6	3	3	5	13
10	Biro Umum		1		1	1	6	3	5	5	77	41
11	Biro Administrasi Pimpinan			1		3	5	4	3	9	11	35
TOTAL		1	12	4	13	10	32	39	51	28	154	163

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Aset tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
I.	Kendaraan												
1	Mobil	7	5	6	2	4	4	160	9	197			
2	Motor	8	6	1	4	10	3	124	14	170			
II.	Bangunan												
1	Gedung Kantor	1	1	1	1	-	-	71	2	77			
2	Gedung Lainnya	-	1	-	1	-	-	32	-	34			
3	Gedung Rapat	-	-	2	1	-	-	-	-	3			
4	Gudang	-	-	1	1	-	-	-	-	2			
5	Mushollah	-	-	2	-	-	-	-	-	2			
III.	Peralatan dan Mesin												
1	Mesin Tik Manual	-	-	3	2	3	7	-	-	15			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
2	PC Unit	12	12	26	7	41	22	174	19	313			
3	PC Lainnya		-	-	9	1	2	-	-	12			
4	Printer	25	-	40	11	58	35	73	18	260			
5	Mesin Foto Copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Laptop/notebook	17	34	23	9	58	25	-	28	194			
7	Scanner	1	-	1	-	1	3	-	1	7			
8	UPS	1	-	10	-	7	14	-	-	32			
9	AC	6	-	11	11	8	15	160	14	225			
10	AC Split	-	-	1	-	12	-	-	-	13			
11	Televisi	2	-	5	6	7	2	106	8	136			
12	Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Pesawat Telephon	1	-	1	2	-	4	-	-	8			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
14	Pesawat Faximille	1	-	2	-	2	1	-	-	6			
15	Meja Komputer	5	-	-	1	9	-	-	-	15			
16	Lemari Besi	16	-	2	-	4	2	-	-	24			
17	Lemari Kayu	-	-	18	3	11	3	-	-	35			
18	Brankas	3	-	1	1	-	-	-	-	5			
19	Rak Kayu	1	-	-	-	3	-	-	-	4			
20	Rak Kaca	-	-	-	-	2	-	-	-	2			
21	Filling Besi	2	-	6	-	8	2	-	-	18			
22	Lemari	12	-	2	-	-	4	91	14	123			
23	Kursi Pejabat	6	-	1	2	29	26	-	-	64			
24	Meja Pejabat	26	-	4	1	17	14	-	-	62			
25	Kursi Kerja	-	-	6	-	47	37	-	-	90			
26	Meja Kerja	40	-	26	-	44	20	126	34	290			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
27	Kursi Tamu	12	-	1	-	1	1	-	-	15			
28	Kursi Rapat	40	-	6	-	34	35	-	-	115			
29	Meja Rapat	3	-	-	-	1	2	-	-	6			
30	White Board	1	-	1	-	1	3	-	-	6			
31	Sofa	1	-	4	1	5	1	210	56	278			
32	Gourden	8	-	-	2	1		-	-	3			
33	Vacum Cleaner	1	-	-	-	2		-	-	3			
34	Kulkas	2	-	2	1	4	2	54	-	65			
35	Dispenser	4	-	3	-	3	-	-	1	11			
36	Kamera	-	-	4	4	6	2	-	18	34			
37	Handy Cam	1	-	-	-	2	-	-	-	3			
38	Proyektor	4	-	3	2	4	4	-	1	18			
39	Layar Proyektor	2	-	-	-	-	-	-	-	2			
40	Handy Talky	2	-	-	-	6	-	-	40	48			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
41	CCTV	2	-	-	-	2	-	-	2	6			
42	Mesin Hitung	-	-	-	-	2	-	-	-	2			
43	Penghancur Kertas	1	-	-	-	-	-	-	2	3			
44	Mesin Absen	1	-	-	-	2	-	-	-	3			
45	Sound System	1	-	-	-	-	-	119	1	121			
46	Wireless	1	-	-	-	-	-	-	-	1			
47	Mixer		-	-	-	-	-	-	1	1			
48	Exhaust Fan		-	-	-	-	-	-	3	3			
49	Kaca Hias	2	-	-	-	-	-	-	-	2			
50	Gambar Presiden	1	-	-	-	-	-	-	-	1			
51	Digitizer	1	-	-	-	-	-	-	-	1			
52	Monitor	2	-	-	-	-	-	-	-	2			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
53	Lift/elevator	-	-	-	-	-	-	3	-	3			
54	Tempat Tidur / Spring Bed	-	-	-	-	-	-	65	-	65			
56	Alat dapur Lainnya	-	-	-	-	-	-	476	-	476			
57	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	-	-	1	-	98	-	99			
58	Lain-lain	-	-	-	-	-	2	691	-	693			
59	Global Positioning System (GPS)	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
60	Laser Disc	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
61	Hardisk	-	-	-	-	3	-	-	-	3			
62	Mainframe	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
63	External	-	-	-	-	1	-	-	-	1			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Nama Inventaris	Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan								Jumlah	Kondisi		
		Biro Pemerintahan dan Otda	Biro Kesra	Biro Hukum	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Organisasi	Biro Umum	Biro Administrasi Pimpinan		Baik	Sedang	Rusak
64	Server	-	-	-	-	8	-	-	-	8			
65	Modem / Peralatan Jaringan Lain	-	-	-	-	2	-	-	-	2			
66	Tele Recorder	-	-	-	-	1	-	-	-	1			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi masing-masing instansi, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun barang inventaris tersebut masih perlu penyesuaian dengan jumlah pengguna, sehingga tidak terjadi jumlah barang lebih dari jumlah penggunaannya, dan masih perlunya memperhatikan analisa kebutuhan barang, serta masih perlunya menginventarisasi barang berdasarkan kondisi akhir, sehingga kondisi akhir barang tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi atau perlu dilakukan pemeliharaan barang yang ada.

Kemudian pola distribusi barang ke pengguna, masih perlu difokuskan pada kondisi beban kerja yang lebih tinggi, sehingga barang inventaris yang ada, berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013-2018 yang diukur menggunakan beberapa indikator di antaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau indikator kinerja lainnya. Adapun capaian kinerja pada lingkup sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Tabel 2.8 (T-C.23) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Perangkat Derah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1. BIRO PEMERINTAHAN												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN dan PENATAAN PEMERINTAHAN	Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	%			100	100	100	100	>	=	
		Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah	%			80	80	100	100	>	=	
		Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota	%			80	80	100	100	>	=	
		Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota	%			100	100	100	100	=	=	
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah	%			100	100	100	100	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH	Peningkatan jumlah kerjasama daerah	MoU/PKS			18	20	150	200	>	>	
	PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA	% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi	%			80	100	100	100	>	>	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%			80	100	100	100	>	>	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%			80	100	100	100	>	>	
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%			80	100	100	100	>	>	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
2. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT												
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas)	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persen	1	-	1,75	1,55					
		% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas)	Persen	86,64	-	10	10	36,67	35,14	=	=	
		% Penurunan Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	Persen	1	-	10	10					
	PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEAGAMAAN	% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
	PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	% Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahraagaan, pendidikan dan seni budaya	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
		% Pelaksaaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
		% Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Persen	-	-	20	20	20	20	=	=	
	3. BIRO HUKUM											
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	%	-	-	100	100	100	100	=	=	Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH	Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi	Perda	-	-	12	12	12	12	=	=	Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan
		Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Perda	-	-	50	50	50	50	=	=	Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEROV BIJAKAN PEMERINTAHAN	% LHP aparat fungisonal prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	=	=	Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LEGISLASI DAERAH	Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	%	-	-	100	100	100	100	=	=	Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	-	-	100	100	-	-	(<)	(<)	Tidak Dianggarkan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	-	-	100	100	-	-	(<)	(<)	Tidak Dianggarkan
4. BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	-	-	100	100	98,04	87,14	=	<	Adanya beberapa kegiatan yang telah terjadwal berubah menjadi virtual, dan belanja jasa pihak ketiga yang belum dibayarkan (utang)
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			-	-	-	100	-	96,84	-	<	Adanya kelebihan anggaran yg tidak dapat digunakan karena dana yg dianggarkan melebihi standar harga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presentase ASN Nilai SKP Kategori BAIK	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Temuan Material	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
5. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA												
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BARANG/JASA	% Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Rencana	%	-	-		100		100		=	
		% Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	%				100		100		=	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%				100		100		=	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	-	-		100		100		=	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Prosentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan rencana	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prosentase Kepuasan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	%	-	-	-	-	-	-	-	-	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
6. BIRO ORGANISASI												
	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (Prioritas)	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	%			100	100	100	100	=	=	
	PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Cakupan fasilitasi penataan Tatalaksana Umum lingkup Prov. Sulsel	PD			45	39	45	39	=	=	
		Cakupan fasilitasi penataan Tatalaksana Umum Kab/Kota se Sulsel	KAB/KO TA			24	24	24	24	=	=	
		Cakupan fasilitasi penataan standarisasi tatalaksana lingkup Prov. Sulsel	PD			45	39	45	39	=	=	
		Cakupan fasilitasi penataan standarisasi tatalaksana Kab/Kota se Sulsel	KAB/ KOTA			24	24	24	24	=	=	
			UPT			142	120	142	120	=	=	
	CABANG DINAS			34	33	34	33	=	=			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
		Cakupan fasilitasi pembinaan pelayanan publik lingkup Prov. Sulsel	PD			45	39	45	39	=	=	
		Cakupan fasilitasi pembinaan pelayanan publik Kab/Kota se Sulsel	KAB. KOTA			24	24	24	24	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Cakupan pembinaan SAKIP PD Provinsi	PD			45	39	45	39	=	=	
		Cakupan pembinaan SAKIP Kab/Kota	Kab/Kota		Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	24	24	24	24	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%			100	100	100	100	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Unit									
		Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Dokumen			10	10	10	10	=	=	
			Laporan			1	1	1	1	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER SARA APARATUR	Persentase ASN berkinerja sangat baik	Orang			550	-	550		=		
			Laporan			1	-	1		=		
7. BIRO UMUM												
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	Persen (%)			100	100	100	100	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persen (%)			100	100	100	100	=	=	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	Persen (%)			0	100	0	100	=	=	
		Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola	Jenis			20	20	20	20	=	=	
		Cakupan jumlah pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Pelayanan			2140	2150	2140	2150	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
		Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola	Unit			1048	1058	1048	1058	=	=	
		Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen			15125	15205	15125	15205	=	=	
		Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan			11414	11534	11414	11534	=	=	
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen (%)			0	0	0	0	=	=	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Persen (%)			0	0	0	0	=	=	
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	Persen (%)			0	0	0	0	=	=	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
8. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN												
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	-	-		100		100			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	-	-		100		100			
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	-	-		100	-	-			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	%	-	-		100	-	-			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM & SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun ke-		Interprestasi belum tercapai(<) Sesuai(=) melampaui (>)		Faktor mempengaruhi capaian
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASSA MEDIA	Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa		-	-							
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jenis	-	-		3		3			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	-	55	61	BB	-	>	-	
		Presentase ASN Nilai SKP Kategori BAIK	%	-	-	81	82	-	-	-	-	
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	95	96	-	-	-	-	
		Persentase Temuan Material	%	-	-	3%	2%	-	-	-	-	
		Persentase layanan (materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan yang di tersedia	%			100%	100%	100%	100%	=	=	
		Indeks Kepuasan Layanan keprotokolan	Jenis	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BIRO PEMERINTAHAN																				
1	Jumlah pengkajian produk hukum Daerah dengan target yang direncanakan (Pergub, Kepgub, Instruksi Gub dan Perjanjian Kerjasama			1358	1358	1358	1358	1358	1358	2372	1952	3374	3130		174%	143%	248%	230%		
2	Persentase kegiatan sosialisasi / bimtek terkait pembentukan produk hukum daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
3	Persentase kegiatan pembinaan PPNS dari target yang direncanakan			100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0		100%	100%	0	0		Sejak tahun 2017 Kewenangan koordinasi PPNS Beralih ke Kantor Satpol PP
4	Jumlah SKPD Pemprov / Kab / Kota yang telah difasilitasi dalam pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
5	Jumlah Produk Hukum yang tersedia (buku Perda, Pergub) dari target yang direncanakan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
6	Persentase orang / SKPD yang diberi pelayanan terkait penyebarluasan produk hukum	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
7	Jumlah perkara pemda yang ditangani dari keseluruhan perkara yang diterima	20	20		20	20	20	20	20	45	36	22	35		225%	180%	110%	175%		
8	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dari permohonan yang masuk	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
9	Persentase penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat fungsional yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
10	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan produk hukum Daerah Kab/Kota	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Persentase Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang diasistensi / dievaluasi /diklarifikasi (Ranperda, Perda) dari permohonan yang masuk	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																				
1	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah SKPD yang menggunakan server yang terkoneksi melalui data center (sub domain)			20 OPD	30 OPD	35 OPD	45 OPD	-	-	30 OPD	35 OPD	-	-		30 OPD	35 OPD	-	-	-	
5	Cakupan kerja sama informasi aktif dengan media massa			41 Media Massa	49 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa		51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	51 Media Massa	
6	Persentase kepuasan pelayanan kedinasan kepala daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
BIRO PEREKONOMIAN																				
1	Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	98	98	99,09	98,62		98	98	99,09	98,62		
2	Persentase optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				100%	100%	100%	-	100%	99	100	-	99,82		99	100	-	99,82		
3	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%	-	-	98	97	-	-		98	97	-	-		
4	Tercapainya pengembangan Perekonomian Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	96	92	85,5	96,46		96	92	85,5	96,46		
5	Tersedianya Informasi Pembinaan Kelembagaan Ekonomi				100%	100%	100%	100%	100%	97	98	99,17	99,71		97	98	99,17	99,71		
6	Terlaksananya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi				100%	100%	100%	-	-	98	98	-	-		98	98	-	-		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai				100%	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
8	Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan system evaluasi				-	-	-	100%	100%	-	-	99,31	98,96		-	-	99,31	98,96		
BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG / JASA																				
1	Persentase peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran dan kapasitas kinerja OPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,95	94,47	98,69	91,44		97,95	94,47	98,69	91,44		
2	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,95	94,47	98,69	99,25		97,95	94,47	98,69	99,25		
3	Jumlah laporan / dokumen pembinaan jasa usaha pembangunan lingkup prov Sulawesi Selatan			100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	100 % (4 Dok)	97,95	92,66	98,97	-		97,95	92,66	98,97	-		
4	Cakupan pelaku usaha jasa pembangunan yang bersertifikasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,95	92,66	98,97	97,44		97,95	92,66	98,97	97,44		
5	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan Administrasi pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,68	92,52	97,52	-		89,68	92,52	97,52	-		
6	Jumlah laporan / dokumen informasi pembangunan Prov. Sulawesi Selatan			100%	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	100 % (8 Dok)	89,68	92,52	97,52	95,92		89,68	92,52	97,52	95,92		
BIRO KESEJAHTERAAN																				
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100	100	100	100	-	100	100	100		-	100	100	100		
2	Cakupan Aparatur OPD yang mengikuti pelatihan / sosialisasi / Bimtek				-	100	100	100	100	-	100	100	100		-	100	100	100		
3	Persentase Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen keuangan				-	100	100	100	100	-	100	100	100		-	100	100	100		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana				-	-	100	80	80	-	-	100	80		-	100	100	100		
5	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang kerawanan social				-	652	360	375	375	-	652	360	375		-	100	100	100		
6	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang perlindungan social				-	1050	520	355	355	-	1050	520	355		-	100	100	100		
7	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan				-	1234	2460	1062	1062	-	1234	2460	1062		-	100	100	100		
8	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan fungsi dan peran Lembaga keagamaan dan tokoh agama				-	595	503	580	580	-	595	503	580		-	100	100	100		
9	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pelayanan ibadah haji				-	-	190	305	305	-	-	190	305		-	100	100	100		
10	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang kepemudaan dan olahraga				-	240	160	186	186	-	240	160	186		-	100	100	100		
11	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang Pendidikan dan seni budaya				-	180	300	240	240	-	180	300	240		-	100	100	100		
12	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan dan keberagaman kekayaan dan nilai budaya				-	220	100	180	180	-	220	100	180		-	100	100	100		
13	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan penanggulangan NAPSA dan HIV-AIDS				-	350	450	175	175	-	350	450	175		-	100	100	100		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA																				
1	Persentase pelayanan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan dan sistem penyusunan perencanaan dan cakupan sarana dan prasarana yang tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	93,93	99,45	99,45	93,93		93,93	99,45	99,45	99,45		
2	Persentase pelayanan Administrasi diklat PNS, pembekalan kewirausahaan PNS, pra purna bhakti serta Administrasi praktek siswa dan mahasiswa dan pengelolaan Administrasi CPNS, PNS, Mutasi dan pension PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan				100%	100%	100%	100%	100%	90,43	98,37	98,37	100		90,43	98,37	98,37	100		
3	Persentase Fasilitas pembinaan dan pengembangan akuntabilitas kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	94,37	91,57	91,57	100		94,37	91,57	91,57	100		
4	Persentase fasilitas penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi				100%	100%	100%	100%	100%	90,44	96,31	96,31	96,31		90,44	96,31	96,31	96,31		
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN																				
1	Persentase pelayanan aparatur dan Administrasi aparat structural / fungsional			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,3	99,19	98,06	99,27		99,3	99,19	98,06	99,27		
2	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas pengadaan / pemeliharaan sarana / prasarana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15	98,56	99,13	97,57		98,15	98,56	99,13	97,57		
3	Jumlah dokumen perencanaan, pengelolaan / pengendalian / pengujian keuangan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			100%	235 Dok	240 Dok	240 Dok	240 Dok	240 Dok	96,21	99,55	99,72	99,86		96,21	99,55	99,72	99,86		
4	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,58	99,44	99,77	91,16		88,58	99,44	99,77	91,16		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH																				
1	Akurasi Data Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			5 Laporan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data		100	100	100	100		
2	Jumlah Persil/Bidang Aset Tanah yang disertifikatkan			18 Sertifikat	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang		100	100	100	100		
3	Jumlah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipagar			5 Tanah	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi		100	100	100	100		
4	Jumlah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terselesaikan masalahnya			5 Tanah / Bangunan	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang	2 Persil / Bidang	1 Persil / Bidang		100	100	200	100		
5	Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dihapus			5 Dokumen	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1000 Barang Inventaris	1241 Barang Inventaris	891 Barang Inventaris	5531 Barang Inventaris	0 Barang Inventaris		100	85	300	0		
6	Jumlah rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang yang direncanakan pada SKPD			10 Perencanaan	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar		100	100	100	100		
7	Jumlah Barang yang ditetapkan standar harganya dalam rangka rencana dan belanja barang milik daerah			10 Perencanaan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	1 Buku		100	100	100	50		
8	Jumlah SK pemanfaatan Barang Milik Daerah			5 Laporan	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	15 SK Gubernur	66 SK Gubernur	35 SK Gubernur	6 SK Gubernur	23 SK Gubernur		100	100	100	150		
9	Jumlah Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan status penggunaannya			5 Laporan	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	5 SK Gubernur	55 SK Gubernur	33 SK Gubernur	25 SK Gubernur	21 SK Gubernur		100	300	200	100		
10	Jumlah belanja barang inventaris tertata dan akurat			5 Laporan	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar	1 Daftar		100	100	100	100		
11	Jumlah Layanan Sistem Informasi Manajemen Aset yang digunakan SKPD			1 Aplikasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem		100	100	300	300		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja unit kerja lingkup Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 (lima) tahun terakhir sebesar 96,29 persen dengan kategori kinerja sangat baik.

Berkenaan dengan rasio realisasinya mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan yang juga masuk dalam kategori kinerja sangat baik. Untuk mencapai target ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program pembangunan yang dijabarkan melalui kegiatan terkait dalam mendukung pelayanan kesekretariatan secara maksimal.

Capaian Kinerja untuk indikator sasaran rata-rata sampai dengan tahun 2019 telah mencapai target dengan baik karena telah mencapai hampir 100 persen. Capaian ini dihitung dari target anggaran pada program/kegiatan dibanding dengan realisasi.

2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 2.9 (T.C.24) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
BIRO PEMERINTAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	400.773.724	-	-	-	-	399.063.891	-	-	-	-	99,57	400.773.724	399.063.891
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	-	-	-	908.820.340	-	-	-	-	797.436.204	-	-	-	-	87,74	908.820.340	797.436.204
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	608.758.000	-	-	-	-	597.957.050	-	-	-	-	98,23	608.758.000	597.957.050
Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan	-	-	-	-	1.868.296.600	-	-	-	-	1.776.165.600	-	-	-	-	95,07	1.868.296.600	1.776.165.600
Program Penataan Daerah Otonom Baru	-	-	-	-	402.040.000	-	-	-	-	348.037.850	-	-	-	-	86,57	402.040.000	348.037.850
Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	429.429.300	-	-	-	-	269.534.350	-	-	-	-	62,77	429.429.300	269.534.350
Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	-	-	-	-	996.190.000	-	-	-	-	903.266.700	-	-	-	-	90,67	996.190.000	903.266.700
Program Kerjasama Kawasan Andalan	-	-	-	-	225.700.000	-	-	-	-	200.462.100	-	-	-	-	88,82	225.700.000	200.462.100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	-	-	-	-	186.000.000	-	-	-	-	164.762.800	-	-	-	-	88,58	186.000.000	164.762.800
Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Antara Daerah Provinsi	-	-	-	-	665.021.000	-	-	-	-	476.729.840	-	-	-	-	71,69	665.021.000	476.729.840
Program Penataan dan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja -Dalam Rangka Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	224.296.630	-	-	-	-	6.142.694.385	-	-	-	-	93,3	224.296.630	6.142.694.385
JUMLAH					6.915.325.594					6.142.694.385					88,83	6.915.325.594	6.142.694.385
BIRO HUKUM DAN HAM																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.400.100	428.718.000	166.941.528	492.928.909	676.887.300	421.199.500	426.830.220	166.840.687	491.664.063	628.010.351	99,01	99,55	99,93	99,74	92,78		99,85
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	416.522.000	429.690.000	1.208.137.000	597.700.000	154.840.000	415.677.000	415.980.300	1.146.896.220	597.700.000	153.195.000	99,79	96,8	94,93	100	98,94		99,95
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	116.400.000	189.400.000	361.680.000	133.150.000	-	116.400.000	189.190.000	361.625.000	133.150.000	-	100	99,58	99,98	100	-		99,99



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	882.173.500	1.072.925.000	1.271.975.359	1.396.400.000	859.592.700	881.564.200	1.068.871.975	1.259.343.500	1.373.349.020	837.365.358	99,93	99,62	99	98,34	97,41		99,5
Peningkatan Sistem Legislasi Daerah	528.379.400	1.632.385.000	1.454.308.500	2.011.529.000	799.129.225	520.306.900	1.613.265.840	1.439.779.943	1.986.215.008	780.519.021	98,47	98,82	99	98,74	97,67		98,85
Peningkatan Pemahaman Produk Hukum Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Secara berkesinambungan	1.205.783.400	764.782.000	1.327.022.000	950.050.000	1.566.723,78	1.197.113.800	754.727.600	1.321.215.500	946.875,79	1.326.776.688	99,28	98,68	99,56	99,66	84,68		99,5
Peningkatan dan Penegakan Hukum dan HAM dalam Rangka Pemantapan Advokasi dan Pengamanan Yuridis Kebijakan Pemerintah	974.471.000	1.282.100.000	1.472.575.000	1.698.500.000	971.482.000	972.405.580	1.273.766.760	1.459.892.567	1.679.385.247	958.285.386	99,78	99,35	99,13	98,87	98,64		99,65
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	174.370.600	-	186.350.000	281.800.000	154.600.000	171.537.500	-	185.610.000	280.997.000	146.572.800	99,37	-	99,6	99,71	94,81		94,45
Jumlah	4.298.099.900	5.800.000.000	7.448.989.387	7.562.057.909	3.618.097.949	4.696.204.480	5.742.632.695	6.194.307.197	6.543.407.214	4.830.724.604	99,33	98,96	98,89	99,38	96,7		99,45
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.098.977.013	1.768.204.030	2.374.614.690	2.012.854.396	3.252.447.396	1.083.123.100	1.768.204.030	2.374.614.690	2.012.854.396	3.168.117.897	99	100	100	100	97	2.101.419.505	2.081.382.823
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	1.110.539.940	671.842.820	907.500.000	1.290.380.290	-	1.110.539.940	671.842.820	907.500.000	1.306.886.690	-	100	100	100	101	995.065.763	999.192.363



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	-	22.195.000	113.572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.883.500	67.867.750
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	2.716.150.000	1.728.907.763	1.624.862.910	1.239.100.375	2.048.500.000	2.677.682.017	1.728.907.763	1.624.862.910	1.239.100.375	2.048.500.000	99	100	100	100	100	1.871.504.210	1.862.538.497
Program Kerja Sama Informasi dengan Media	4.068.320.000	4.219.073.065	4.552.392.008	4.761.116.432	6.515.000.000	4.068.320.000	4.219.073.065	4.552.392.008	4.761.116.432	6.451.319.921	100	100	100	100	99	4.823.180.301	4.808.320.065
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.057.555.000	1.280.011.500	977.725.107	2.037.446.184	-	1.049.999.000	1.280.011.500	977.725.107	2.037.446.184	-	100	100	100	100		1.338.184.448	1.336.295.448
Jumlah	8.941.002.013	10.106.736.298	10.201.437.535	10.980.212.387	13.219.899.686	8.868.503.017	10.106.736.298	10.201.437.535	10.980.212.387	13.082.004.426	99	100	100	100	99	11.197.237.726	11.155.596.945
BIRO PEREKONOMIAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.124.178.000	941.675.000	2.287.328.008	798.267.712	1.577.524.595	885.549.000	1.095.306.127	849.099.790	2.234.308.163	781.836.392	1.563.226.442	873.296.400	97,43	90,17	98	98	99,0-9
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	63.300.000	250.000.000	180.000.000	100.000.000	-	340.000.000	62.750.000	247.100.000	148.500.000	100.000.000	-	339.400.000	99,13	98,84	99	100	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.250.000	342.000.000	362.675.100	393.750.000	-	-	387.532.900	294.872.400	383.773.900	382.307.900	-	-	97,31	86,22	98	97	-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Perekonomian Daerah	2.406.263.300	3.816.392.000	2.403.992.500	2.539.060.564	4.027.966.217	1.991.748.400	2.321.876.895	3.653.644.623	2.297.334.799	2.344.949.736	3.443.949.736	1.921.279.307	96,49	95,74	96	92	85,5
Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	105.930.000	1.242.768.000	643.631.000	792.086.000	908.231.000	1.037.017.333,69	102.815.700	1.167.673.000	626.349.500	778.280.408	900.661.070	1.034.046.850	97,06	93,35	97	98	99,17
Program Pembinaan Sarana Perekonomian	108.360.000	-	-	-	-	-	105.745.000	-	-	-	-	-	97,59	-	-	-	-
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	829.020.000	-	-	-	-	-	772.595.700	-	-	-	-	-	93,19	-	-	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi	398.250.000	342.000.000	362.675.100	393.750.000	-	-	387.532.900	294.872.400	383.773.900	382.307.900	-	-	97,31	86,22	98	97	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi	2.406.263.300	3.816.392.000	2.403.992.500	2.539.060.564	4.027.966.217	1.991.748.400	2.321.876.895	3.653.644.623	2.297.334.799	2.344.439.383	3.443.949.736	1.921.279.307	96,49	95,74	96	92	85,5
Jumlah																	
BIRO PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.416.463.800	967.090.000	1.674.716.406	924.348.252	-	1.342.482.500	929.001.620	1.635.486.238	893.88.107	-	94,78	96,06	97,66	96,7	1.245.654.614	1.200.214.616
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	-	1.661.221.026	213.290.000	781.760.188	-	-	1.557.393.450	184.316.000	773.183.350	-	-	94	86,42	98,9	664.067.803	838.297.600



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	438.300.000	464.480.000	634.380.000	-	-	437.562.000	461.456.000	632.248.001	-	-	99,83	10,61	99,66	2.883.277.200	2.812.852.500
Program Pengaturan Usaha Jasa Pembangunan	-	1.414.750.000	2.140.497.659	1.630.437.227	1.960.782.780	-	1.396.998.900	2.096.364.320	1.630.437.227	1.940.546.050	-	98,75	97,95	92,66	98,97	1.185.082.553	1.389.001.579
Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	-	4.518.786.200	3.632.340.000	3.929.875.412	3.500.600.000	-	4.270.140.360	3.257.647.992	3.636.047.097	3.413.910.589	-	99,97	95,89	90,58	97,64	3.895.400.402,3	3.644.436.509
Program Pengembangan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.883.277.200	-	-	-	-	2.812.852.500	-	-	-	-	97,56	-	-	-	-	2.883.277.200	2.812.852.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	797.983.200	-	-	-	-	792.021.510	-	-	-	-	99	-	-	-	-	797.983.200	792.021.510
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	121.544.100	-	-	-	-	121.544.100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	121.544.100	121.544.100
Jumlah	3.802.804.500	7.350.000.000	8.839.448.685	7.912.799.045	7.801.871.220	2.934.396.600	7.009.647.660	8.278.214.878	7.428.132.562	7.653.776.097	98,94	98,64	95,46	93,72	98,35	1.597.192.402	1.802.145.846
BIRO KESEJAHTERAAN																	
Program pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	7.908.591.750	2.090.808.200	-	-	-	7.462.814.511	2.069.461.746	-	-	-	94,36	98,98	1.999.879.990	1.906.455.251



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	460.000.000	-	-	-	-	456.232.000	-	-	-	-	99,18	-	92.000.000	91.246.400
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	-	-	85.400.000	-	-	-	-	84.737.000	-	-	-	-	99,22			
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	-	-	-	113.425.000	-	-	-	-	93.010.000	-	-	-	-	82	-	22.685.000	18.602.000
Program Peningkatan Kelembagaan, data dan Informasi	-	-	-	407.250.000	-	-	-	-	390.303.149	-	-	-	-	95,84	-	81.450.000	78.060.630
Program peningkatan kapasitas dan kinerja skpd	-	-	-	3.557.500.417	25.000.000	-	-	-	3.498.011.391	15.000.000	-	-	-	98,33	60	716.500.083	702.602.278
Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja	-	-	-	3.489.365.800	596.142.800	-	-	-	3.442.547.767	589.690.805	-	-	-	98,66	98,92	817.101.720	806.447.714
Program pengembangan, kebijakan, perlindungan dan kerawanan sosial	-	-	-	7.192.506.284	1.594.801.145	-	-	-	7.046.363.507	1.581.732.885	-	-	-	97,97	98,67	1.757.461.486	1.725.619.278
Program Pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan	-	-	-	11.756.947.500	5.109.591.000	-	-	-	11.641.461.948	5.054.821.300	-	-	-	99,02	99,18	3.373.307.700	3.339.256.650



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama	-	-	-	3.393.515.000	1.309.832.500	-	-	-	3.364.253.900	1.289.738.385	-	-	-	99,14	99,74	940.669.500	930.798.457
Program Peningkatan Koordinasi dan pelayanan ibadah haji	-	-	-	1.480.500.000	792.094.000	-	-	-	1.417.930.600	790.042.500	-	-	-	95,77	99,2	454.518.800	441.594.620
Program Pembinaan pemuda, olahraga, pendidikan dan seni budaya	-	-	-	2.468.686.844	1.137.180.000	-	-	-	2.404.026.494	1.122.050.764	-	-	-	97,38	98,93	721.173.369	705.215.452
Program Pengelolaan dan Keberagaman kekayaan dan nilai budaya	-	-	-	2.601.500.000	115.175.000	-	-	-	2.583.964.500	114.248.750	-	-	-	99,33	98,47	543.335.000	539.642.650
Program peningkatan penanggulangan napza dan hiv/aids	-	-	-	8.230.175.300	236.225.000	-	-	-	8.117.663.330	233.995.000	-	-	-	98,63	99,06	1.693.280.060	1.670.331.666
Program Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	-	-	-	388.050.000	-	-	-	-	382.861.000	-	-	-	-	98,66	-	77.610.000	76.572.200
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	511.325.000	-	-	-	-	501.633.000	-	-	-	-	98,1	-	102.265.000	100.326.600
Program Pembinaan Penyandang sosial dan trauma	-	-	-	368.450.000	-	-	-	-	350.100.000	-	-	-	-	95,02	-	73.690.000	70.020.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Bantuan dan jaminan Sosial	-	-	-	118.450.000	-	-	-	-	102.255.000	-	-	-	-	86,33	-	23.690.000	20.451.000
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	191.650.000	-	-	-	-	179.282.760	-	-	-	-	93,55	-	38.330.000	35.856.552
Program pembinaan serta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	-	-	-	358.375.000	-	-	-	-	333.574.000	-	-	-	-	94,75	-	71.675.000	67.914.800
Program Pemeliharaan Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan percepatan tindak kriminal	-	-	-	205.000.000	-	-	-	-	197.363.300	-	-	-	-	96,27	-	41.000.000	39.472.660
Program Pengembangan nilai budaya	-	-	-	1.199.400.000	-	-	-	-	1.172.097.695	-	-	-	-	97,72	-	239.880.000	234.419.539
Program Pengembangan Kemitraan	-	-	-	717.500.000	-	-	-	-	689.121.600	-	-	-	-	96,04	-	143.500.000	137.824.320
Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-	-	332.500.000	-	-	-	-	312.719.000	-	-	-	-	94,05	-	66.500.000	62.543.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	-	-	-	116.825.000	-	-	-	-	108.150.000	-	-	-	-	92,57	-	23.365.000	21.630.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	-	-	-	200.400.000	-	-	-	-	188.656.900	-	-	-	-	94,14	-	40.080.000	37.731.380



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Kelembagaan, data dan Informasi	-	-	-	407.250.000	-	-	-	-	390.303.649	-	-	-	-	95,84	-	81.450.000	78.060.730
Program Pemberantasan buta aksara al-quran	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	398.546.700	-	-	-	-	99,64	-	80.000.000	79.709.340
Jumlah	-	-	-	58.660.538.895	13.006.849.645	-	-	-	57.315.984.701	12.860.782.135	-	-	-	95,98	33,97	14.333.477.708	14.035.353.367
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.794.600	945.679.878	1.919.171.048	1.347.677.197	2.057.155.140	1.113.512.062	888.286.443	1.908.685.514	1.329.816.775	2.024.676.750	98,82	93,93	99,45	98,67	98,42		98,22
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	434.984.500	460.000.000	552.285.000	314.140.000	195.490.000	420.851.450	415.970.050	543.287.000	310.471.000	194.643.440	96,75	90,43	98,37	98,83	99,57		96,33
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	268.625.000	350.000.000	327.000.000	500.000.000	302.785.000	247.835.800	330.290.800	299.448.800	493.148.134	296.666.142	92,26	94,37	91,57	98,63	97,98		95,36
Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan , Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi	2.752.957.100	2.988.487.500	4.127.964.800	3.570.000.000	4.387.189.860	2.667.436.410	2.702.810.054	3.975.653.322	3.508.966.683	4.052.214.048	96,89	90,44	96,31	98,29	92,36		94,84
Jumlah	4.583.361.200	4.744.167.378	6.926.420.848	5.731.817.197	6.942.620.000	4.449.635.722	4.337.357.347	6.727.074.636	5.642.402.592	5.568.200.380	97,08	91,43	97,12	98,44	94,61		
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.452.608.074	35.845.616.770	36.550.911.167	35.394.584.900	41.806.979.629	45.302.684.114	35.097.772.792	36.296.849.580	35.108.614.761	40.995.903.193	99,67%	97,91%	99,30%	99,19%	98,06%		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.786.675.000	-	-	-	-	21.276.557.150	-	-	-	-	97,66%	-	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.721.950.000	-	-	-	-	2.643.696.475	-	-	-	-	97,13%	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	828.000.000	-	-	-	-	763.000.000	-	-	-	-	92,15%	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.792.579.000	-	-	-	-	1.719.499.800	-	-	-	-	95,92%	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.673.400.000	8.092.600.000	6.557.800.000	6.779.800.000	11.836.482.500	5.666.728.700	7.998.471.975	5.808.595.680	6.741.707.950	11.809.215.675	99,88%	98,84%	88,58%	99,44%	99,77%		
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	-	42.449.843.200	32.642.375.883	30.715.307.684	31.414.765.270		41.467.667.662	32.039.965.425	30.273.408.677	31.140.680.702		97,69%	98,15%	98,56%	99,13%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	-	1.981.940.030	2.629.854.730	2.776.646.931	2.630.833.080		1.920.576.150	2.530.287.254	2.764.264.399	2.623.535.990		96,90%	96,21%	99,55%	99,72%		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN PADA TAHUN (%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
Jumlah																	
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.000.000	996.972.400	970.698.205	1.301.446.298	3.210.325.378	788.486.600	984.833.300	963.251.833	1.246.241.490	3.047.400.178	98,93	98,78	99,23	95,76	94,92	603.331.345	564.728.395
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	4.553.512.500	6.847.706.200	6.731.860.000	8.763.739.802	12.868.618.875	4.471.767.491	6.700.672.470	6.343.686.495	8.510.977.153	11.481.197.387	98,2	97,85	94,23	97,12	89,22	2.078.776.594	1.752.357.474
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1.186.196.500	2.238.865.800	2.328.183.000	2.914.000.098	2.943.225.000	1.175.473.350	2.136.888.400	2.306.628.450	2.873.402.350	2.789.901.257	99,1	95,45	99,07	98,61	94,79	439.257.125	403.606.977
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	313.291.000	-	-	-	-	310.726.000	-	-	-	-	99,18	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6.850.000.000	10.083.544.400	10.030.741.205	12.979.186.198	19.022.169.253	6.746.453.441	9.822.394.170	9.613.566.778	12.630.620.993	17.318.498.822	98,49	97,41	95,84	97,31	91,04	9.043.042.313	2.643.011.345



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga dapat dilihat pada seluruh kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan menggunakan anggaran yang ada dan secara keseluruhan dapat mencapai sasaran.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya ekonomi, politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memilih peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan sebagai lembaga pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa lembaga /organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan diuraikan sebagai berikut.

2.5.1 Tantangan (*Threats*) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Implementasi Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
7. Adanya Perubahan nomenklatur kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun 2020.
8. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Sarana Prasarana, tidak sebanding dengan jumlah SDM ASN yang harusnya dipenuhi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2.5.2 Peluang (*Opportunities*) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun LPPD.
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam capaian perolehan nilai A SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Berkembangnya Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penerapan *e-Government*.
4. Rencana Aksi dalam implementasi Reformasi Birokrasi
5. Pengembangan SDM aparatur sehingga dapat berdaya saing sebagai salah satu faktor penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah **"belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**, yang tergambar dari lemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa :
 - 1) Rendahnya Peringkat LPPD Provinsi Sulawesi Selatan
 - 2) Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 3) Rendahnya Pencapaian Peyeleasaan Batas Wilayah Kab/Kota
 - 4) Rendahnya Pencapaian Urusan SPM
 - 5) Belum optimalnya pelaksanaanTata Cara Kerja Sama Daerah



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- 6) Belum Optimalnya Pemahaman Daerah tentang Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- 7) Banyaknya Kebutuhan terhadap Produk hukum yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu
- 8) Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Permasalahan dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa :
 - 1) Belum Optimalnya Pengelolaan Kegiatan terkait peningkatan perekonomian daerah di Perangkat Daerah
 - 2) Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang
3. Permasalahan dalam Bidang Administrasi
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa :
 - 1) Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, standar harga barang dan rencana pemeliharaan barang di OPD
 - 2) Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum
 - 3) Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal
 - 4) Peningkatan Nilai SAKIP yang belum optimal
 - 5) Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum optimal
 - 6) Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target
 - 7) Penataan nomenklatur Perangkat Daerah
 - 8) Penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah
 - 9) Pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi
 - 10) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah
 - 11) Kebutuhan jabatan pada perangkat daerah belum memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai ketentuan
 - 12) Belum optimalnya kualitas layanan Keprotolan
 - 13) Belum optimalnya perencanaan anggaran dan pengelolaan kepegawaian Setda



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A	Biro Organisasi		
1	Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal	Pelayanan publik belum memenuhi indikator instrumen evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik Belum optimalnya penerapan Gerakan “Satu Instansi Satu Inovasi” (one agency one innovation), dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
2	Keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja	Peningkatan Nilai SAKIP yang belum optimal	Penyajian Laporan Kinerja belum sesuai dengan PerMenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Belum sinerginya penyusunan dokumen perencanaan
3	Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum optimal	Rendahnya pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target	Perangkat Daerah belum seluruhnya melaksanakan PMPRB Tim Asesor yang dibentuk di internal unit kerja belum optimal Masih kurangnya tanggung jawab masing-masing OPD pada 8 area perubahan yang menjadi skala prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Penataan nomenklatur Perangkat Daerah	Fasilitasi kebijakan penataan nomenklatur berdasarkan perumpungan urusan pemerintahan
		Penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	Fasilitasi kebijakan penataan produk hukum susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja bagi 39 perangkat daerah
		Pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi	Fasilitasi rekomendasi Gubernur terhadap pembentukan, pengubahan dan peningkatan UPT Kementerian
		Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah	Pemantauan, pendampingan dan evaluasi perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi
		Kebutuhan jabatan pada perangkat daerah belum memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai ketentuan	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah tidak berdasar pada kebutuhan organisasi, cenderung menyesuaikan dengan <i>bezetting</i> pegawai yang ada
			Khusus kebutuhan Jabatan Fungsional yang diusulkan tidak berdasarkan kebutuhan organisasi tetapi menyesuaikan dengan pegawai akan beralih ke Jabatan Fungsional sehingga analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun menyesuaikan dengan orang yang akan menduduki jabatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan <i>real</i> organisasi
B	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
1	Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Utama di bidang Pemerintahan	Rendahnya Peringkat LPPD Provinsi Sulawesi Selatan	Rendahnya Pemahaman OPD terhadap Penyusunan dokumen LPPD dan belum efektifnya penyusunan data LPPD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih kurangnya pembinaan tentang EPPD
		Rendahnya Pencapaian Peyeleasaan Batas Wilayah Kab/Kota	Terhambatnya proses penyelesaian segmen batas wilayah kab/kota dan masih banyaknya konflik antar batas wilayah
		Rendahnya Pencapaian Urusan SPM	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Bidang Sosial dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Belum Optimal
		Belum optimalnya pelaksanaanTata Cara Kerja Sama Daerah	Kurang Berfungsinya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
		Belum Optimalnya Pemahaman Daerah tentang Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Masih rendahnya koordinasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat
C	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
1	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Pengelolaan Kegiatan terkait peningkatan perekonomian daerah di Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD
		Masih rendahnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personil terkait pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM dan belum tersedianya data bidang perekonomian dan pembangunan Belum tersedianya data analisa perekonomian
			Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik
C	Biro Hukum		
1	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	Banyaknya Kebutuhan terhadap Produk hukum yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Masih rendahnya kapasitas/ kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan Lemahnya pengumpulan/ penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan; Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
D	Biro Kesra		
1	Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya peran lembaga keagamaan	Rendahnya fasilitas keagamaan yang ada



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya pembinaan dan penanganan konflik antar umat beragama
			Kurangnya pengetahuan dan skill aparatur terkait bidang keagamaan
			Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan
		Persentase penduduk Berumur 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab hanya sebesar 36,36 persen (Data BPS 2018)	Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab
		Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret tahun 2018 sebesar 792,64 ribu jiwa atau 9,06 persen (Data BPS 2018)	Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin
			Kurangnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya peran bidang kesra dalam menangani permasalahan sosial masyarakat seperti meningkatnya pengguna narkoba dan kejahatan seksual	Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual
			Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah belum berjalan secara optimal
E	Biro Pengadaan Barang/Jasa		
1	Pencapaian Kinerja dan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang	Kurangnya kesadaran dan pemahaman PA/KPA terhadap erencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP
		Proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu	Terlambatnya up load RUP dari masing-masing OPD
G	Biro Umum		
1	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, standar harga	Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di OPD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		barang dan rencana pemeliharaan barang di OPD	Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi
2	Dukungan Teknis dan Pelayanan Umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum	Pelaksanaan SOP masih belum optimal Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah
H	Biro Administrasi Pimpinan		
1	Pencapaian kinerja dan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Belum optimalnya kualitas layanan administrasi pimpinan daerah	Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal Tingkat pemahaman SOP keprotokolan rendah Kurangnya ketersediaan data Masih rendahnya kapasitas/ kompetensi sumber daya manusia aparatur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang berkaitandengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan perbagian dalam uraian berikut :

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah :

“ SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”

Dimana makna visi di atas dijabarkan secara terperinci sebagai berikut :

1. Inovatif



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Kemampuan menciptakan gagasan baru, Produk Baru, dan Layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kompetitif

Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar

3. Produktif

Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Inklusif

Kondisi system dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

5. Berkarakter

Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan

Untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak dengan leading sektor SKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban misi tersebut dengan fungsi sebagai auxalary staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap pencapaian pada misi pertama (1) **Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif** dan Empat (4) **Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**. Untuk menjalankan amanah tersebut, Sekretariat Daerah mewujudkannya dengan beberapa program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2018-2023 yang akan dibahas pada bab selanjutnya.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER”				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Kualitas Pelayanan Publik	Komitmen pimpinan atas pemenuhan indikator penyelenggaraan pelayanan publik	Pemenuhan/kepatuhan terhadap aspek, komponen dan indikator penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu : ✓ Aspek Kebijakan Pelayanan Publik (SPP, Maklumat Pelayanan, SKM, Budaya pelayanan) ✓ Aspek Profesionalisme SDM ✓ Aspek Sarana dan Prasarana ✓ Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik ✓ Aspek Konsultasi dan Pengaduan ✓ Aspek inovasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER”				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur penyelenggara pelayanan publik masih kurang	Profesionalisme SDM Aparatur penyelenggara pelayanan publik
			Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah Kab/Kota terhadap anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik	Pedoman aturan yang jelas
			Sikap masa bodoh atau apatis dari masyarakat pengguna pelayanan publik	Pengawasan dan Akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment bagi penyelenggara pelayanan publik
			Kurangnya sosialisasi dan pendampingan menemu kenali inovasi pelayanan publik serta bimbingan teknis dan <i>coaching</i> terkait penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor 067/1783/B.Ortala tentang pelaksanaan Gerakan <i>One Agency One Inovation</i> di Sulawesi Selatan dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Nasional



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Masih minimnya pemahaman pemangku jabatan terkait pentingnya penyusunan peta proses bisnis	Peta Proses Bisnis dapat menjadi rujukan bagi TAPD dan APIP dalam melakukan pembagian dan pengawasan anggaran
				Peta Proses Bisnis merupakan dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi keharusan bagi setiap OPD dalam rangka melakukan pekerjaan/pelayanan yang optimal
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya seluruh OPD pada pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), terkait 8 area perubahan yang menjadi pokok pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam	Adanya pengintegrasian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rangka peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	
			Masih rendahnya komitmen pimpinan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersedianya tenaga assesor yang memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi
		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel	Tersedianya pedoman pemetaan dan penataan nomenklatur perangkat daerah
		Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Utama di bidang Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap pemenuhan kebijakan daerah	Tersedianya pedoman nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh kementerian



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Belum adanya kebijakan strategis pemerintah pusat yang menetapkan atas kebutuhan dari penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah	Adanya komunikasi yang teradministrasi dengan baik, serta adanya penetapan pedoman terhadap pembentukan unit kerja pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
			Pemetaan perangkat daerah yang efektif dan efisien belum optimal	Adanya kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah
			Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap substansi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Penataan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah kebutuhan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, sehingga harus disusun sebagai kebutuhan organisasi
			Kurangnya Pemahaman OPD terhadap LPPD, Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD	Komitmen Kepala OPD; Bimtek Kepala OPD tentang LPPD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kurangnya Pembinaan Terhadap 24 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota
			Kurangnya anggaran untuk melakukan Koordinasi, Pembinaan, fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota	Tersedianya Anggaran Untuk Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap 24 Kab/Kota
		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	Belum adanya <i>blue print</i> pengembangan industri kecil mikro, Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM, Belum tersedianya data analisa perekonomian, Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah, Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik, Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	Adanya komitmen pimpinan Adanya sinergi koordinasi penyusunan Kebijakan pemberdayaan IKM (Adanya koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	Masih rendahnya kapasitas/kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan, Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan, Lemahnya pengumpulan/penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan; Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)y	- Adanya komitmen pimpinan untuk memberi kesempatan kepada aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. - Adanya koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan - Adanya koordinasi perangkat daerah (PD) program perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan produk hukum daerah. - Adanya Koordinasi Data Produk Hukum Daerah ke Perangkat Daerah (PD) - Adanya dukungan sarana dan prasarana dan pengoperasian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER”				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum optimal peran Lembaga keagamaan dan fasilitas keagamaan; Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani, media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan
			Belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin, Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin,	Adanya keyakinan yang kuat pimpinan daerah bahwa keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterakan masyarakat.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER”				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual, Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah belum berjalan secara optimal, Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan	Adanya komitmen pimpinan, aturan yang dapat dipedomani, media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian Kinerja dan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP; Terlambatnya upload RUP dari masing-masing OPD, Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang	Adanya Aplikasi SPSE; Adanya Pokja yang Bersertifikasi; Adanya Komitmen Pimpinan Daerah
			Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di OPD; Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi, Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, standar harga barang dan rencana pemeliharaan barang di OPD	Sarana pengolahan data



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Visi : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF dan BERKARAKTER				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan serta layanan umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum , Pelaksanaan SOP masih belum optimal; Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; Belum optimalnya kualitas pelayanan kerumahtangaaan terhadap pimpinan Daerah	Komitmen pimpinan dan media komunikasi
		Pencapaian kinerja dan Belum optimalnya layanan keprotokolan	Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal, lemahnya koordinasi lintas OPD, terbatasnya Kompetensi SDM untuk pelayanan keprotokolan dan Komunikasi terhadap Pimpinan Daerah; Belum optimalnya kualitas layanan administrasi pimpinan daerah	Komitmen pimpinan dan Sarana Pendukung



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Sekretariat Daerah

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah terkait pencapaian Renstra seluruh Perangkat daerah dalam hal ini:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah; 2. Pengelolaan Barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri 3. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan; 4. Meningkatnya tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri.	1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Penyusunan kebijakan Belum berdasarkan suatu telaah atas data/ informasi yang kuat dan dan kapasitas SDM baik skill dan pemahaman tentang sasaran kinerja Pencapaian kinerja dan pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Ketersediaan data/informasi pendukung dan penguasaan analisis kebijakan 1. Belum optimal peran Lembaga keagamaan dan fasilitas keagamaan; 2. Masih kurangnya tenaga pengajar baca tulis huruf arab; 3. Belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait bantuan Raskin,	Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis. 1. Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani, 2. Media komunikasi dan sarana pengelolaan kegiatan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			4. Kurangnya pemahaman baik OPD dan masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan raskin, 5. Terbatasnya tenaga pendamping bidang Kesra terkait masalah narkoba dan kejahatan seksual, 6. Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah belum berjalan secara optimal, 7. Kurang jelasnya batasan antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan OPD teknis dalam penyusunan kebijakan terkait kepemudaan dan keolahragaan.	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Produk Hukum	1. Masih rendahnya kapasitas/kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan, 2. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3. Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan, 4. Lemahnya pengumpulan/penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan;	1. Adanya kerjasama swakelola dengan PP 2. OTODA UNBRAW dalam penyusunan Raperda 3. Adanya legal drafting produk hukum selain 4. Perda yang disusun oleh OPD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			5. Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).	
	2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap perekonomian daerah dan administrasi pembangunan	Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD	Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani
		Integrasi dan informasi dengan Stakeholder Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menghasilkan rumusan kebijakan	1. Belum adanya blue print pengembangan industry kecil mikro, 2. Lemahnya koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan IKM, 3. Belum tersedianya data analisa perekonomian, 4. Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah, 5. Belum adanya Tata Kelola Yang BUMD/BLUD yang Baik, 6. Belum Optimalnya koordinasi dengan	1. Adanya komitmen pimpinan 2. Adanya sinergi koordinasi penyusunan 3. Kebijakan pemberdayaan IKM 4. Adanya koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Stakeholder bidang perekonomian dan pembangunan	
	3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang dan kapasitas SDM baik skill dan pemahaman tentang sasaran kinerja 1. Koordinasi Pencapaian PK dan IKU seluruh Perangkat Daerah belum optimal 2. Pengendalian atas Pencapaian seluruh target pembangunan belum dilaksanakan secara optimal	Kurangnya kesadaran PA/KPA terhadap perencanaan kegiatan dan kewajiban mengupload RUP; Terlambatnya up load RUP dari masing-masing OPD 1. Kualitas indikator dan kapasitas Perangkat Daerah dalam mendorong pencapaian target tujuan/sasaran kinerja yang ditetapkan 2. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kualitas tolok ukur keberhasilan kebijakan yang ditetapkan 3. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan	Adanya Aplikasi SPSE; Adanya Pokja yang Bersertifikasi; Adanya Komitmen Pimpinan Daerah 1. Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (diampu oleh Biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi Akuntabilitas 2. Pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan pembangunan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pelaporan kinerja pada Perangkat daerah	3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Perangkat daerah
	5. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan umum	Pencapaian kinerja dan Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan serta layanan umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum, Pelaksanaan SOP masih belum optimal; Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; Belum optimalnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan Daerah	Komitmen pimpinan dan media komunikasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Renstra K/L	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	6. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan administrasi pimpinan	Pencapaian kinerja dan Belum optimalnya layanan Administrasi Pimpinan	1. Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal, lemahnya koordinasi lintas OPD, terbatasnya Kompetensi SDM untuk pelayanan keprotokolan dan Komunikasi terhadap Pimpinan Daerah; 2. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi pimpinan daerah	Komitmen pimpinan dan Sarana Pendukung



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas ketersediaan data dan informasi bidang Kesra;
3. Meningkatnya tata kelola dan kualitas produk hukum ditetapkan tepat waktu;
4. Meningkatnya tata kelola dan kualitas data informasi bidang ekonomi dan administrasi pembangunan;
5. Meningkatnya tata kelola dan kualitas pengelolaan barang dan jasa;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
7. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan umum
8. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan administrasi pimpinan

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi pusat dan Provinsi. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan urusan Penunjang Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019. Namun tetap melakukan pelayanan terhadap OPD yang membutuhkan dukungan terkait penyelenggaraan fungsi untuk mewujudkan keselarasan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Untuk setiap Bidang Pelayanan Administrasi dalam menangani berbagai permasalahan, Sekretariat Daerah harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di OPD maupun di Kabupaten/Kota sehingga di dalam pemetaan permasalahan terkait pelayanan Kesekretariatan dapat secepatnya ditindaklanjuti. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Sekretariat Daerah dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dokumen terkait serta mempertimbangkan kondisi-kondisi terkini, terdapat isu-isu strategis dapat diidentifikasi dan direview kembali yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari beberapa dari faktor-faktor seperti pada tabel berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 3.4
Identifikasi Isu- isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	Isu Strategis
1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik yang inovatif
		Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah yang bersih melayani
		Penguatan fungsi unit kerja dalam pelayanan
2.	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Termasuk juga di dalamnya urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat;
		Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan capaian peringkat LPPD
		Reformasi Birokrasi
3.	Sasaran Jangka Menengah dan Renstra Perangkat Daerah	Peningkatan fungsi dalam mendukung pencapaian SDGs dan revolusi industry
		Aksesibilitas usaha kecil dan mikro terhadap lembaga keuangan dan pemberdayaan industri kecil mikro
4.	Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan fungsi dan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Pelayanan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum secara inklusif
		Produk hukum yang terbit tepat waktu
		Implementasi UU 23 Tahun 2014 terkait urusan kewenangan pada pelayanan perangkat daerah



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	Isu Strategis
5.	Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan produk hukum dan tatalaksana pengelolaan (Pencapaian SDGs)
		Peningkatan fungsi dan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Adapun isu-isu strategis yang terkemuka yang dihadapi pada pemerintahan daerah pada umumnya, dan pada khususnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, laporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*;

4. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional reengineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Dalam rangka mendukung program nyata gubernur Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Guna mendukung Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Unit Kerja dalam menunjang pelaksanaan tatakelola Pemerintahan Sekretariat Daerah mendukung misi pertama yaitu **“Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif”** dan misi empat (4) **Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.** melalui Reformasi Birokrasi serta dalam hal mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien dan mewujudkan percepatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah dirumuskan bersama adalah:

1. Meningkatkan efektifitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah
2. Mengembangkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum.
2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
5. Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disamping mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan melalui IKU Daerah, Sekretariat Daerah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1404/VI//Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020, sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah serta RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2021, sedangkan yang fokus pada indikator pendukung internal organisasi tidak dijadikan sebagai IKU sekretariat daerah namun diuraikan pada perjanjian kinerja.

Untuk melihat rumusan lengkap target indikator Sasaran Sekretariat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama sekretariat daerah	1.1 Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	1 Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			2 Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Persentase Usulan Penyelesaian Batas Wilayah Kab/Kota yang difasilitasi	8,30%	11,70%	21,70%	28,30%	30%
			4 Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Skor Reformasi Birokrasi Pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,40	2,40	3,00	4,00	5,00
			6. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		1.2 Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	7. Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%
			9. Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		1.3 Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	11. Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Provinsi SulSel	64,28 (B)	70,00 (BB)	76,00 (BB)	80,00 (A)	85,00 (A)
			12. Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi	61,24 (B)	70,00 (B)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (A)
			13. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi terkait penataan kelembagaan dan analisis jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota
			14. Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dibina berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota
			15. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi tatalaksana pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota	39 PD dan 24 Kab/Kota
			16. Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
			17. Indeks pelayanan Keuangan lingkup Sekretariat Daerah yang tepat waktu	70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)
			18. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	75 (Puas)	80 (Puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95 (sangat puas)
			19. Persentase layanan (materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan yang di tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Akuntabilitas Perangkat Daerah	20. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55 (CC)	61 (B)	71 (BB)	81 (A)	91 (AA)
			21. % capaian kinerja Program Perangkat Daerah	95%	96%	97%	98%	99%
			22. % Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material)	0,03 (99,97%)	0,02 (99,98%)	0,01 (99,99%)	0,01 (99,99%)	0,00 (100%)
2.	Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter	2.1 Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	23. Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, dimana melalui arah kebijakan dapat diterjemahkan program kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Sekretariat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Identifikasi faktor-faktor S.W.O.T. tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah
2. Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana operasional dari pemerintah daerah.
5. Terbentuknya Aparatur Sipil Negara yang mandiri dan berintegritas.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara belum memadai dari kebutuhan
2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi (IT) oleh sumber daya aparatur.
3. Penyediaan anggaran masih kurang memadai dibanding kebutuhan operasional.

c. Peluang (Opportunities)

1. Kesadaran dan tuntutan OPD akan pelayanan yang bermutu sangat tinggi.
2. Dukungan dari stakeholder terkait cukup tinggi terhadap pelaksanaan Program/kegiatan.
3. Terbukanya dukungan lintas sektor (OPD terkait)
4. Tuntutan peraturan yang kuat akan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas.
5. Adanya keyakinan yang kuat pimpinan daerah bahwa keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterakan masyarakat.

d. Tantangan (Threats)

1. Mutasi sumber daya aparatur
2. Perkembangan teknologi informasi yang belum dimaksimalkan penerapannya
3. Peran pimpinan belum sepenuhnya maksimal.
4. Permasalahan tata kelola dan pembinaan SDM aparatur belum menjadi isu utama dalam perencanaan.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :

1. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;
2. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan menghadapi tantangan. (ST) adalah:
 - 1. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
 - 2. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
 - 3. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional
 - 4. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
- c. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
 - 1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia.
 - 2. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik
 - 3. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT) adalah:
 - 1. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur
 - 2. Perbaikan masalah tatakelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.
 - 3. Penerapan Aparatur Sipil Negera Untuk lebih Efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan Tugas kedinasan.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2018-2023

Tabel 5.1 Analisis S.W.O.T.

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
Dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara belum memadai dari kebutuhan	Kesadaran dan Tuntutan OPD akan pelayanan yang bermutu sangat tinggi	Perkembangan teknologi informasi yang belum dimaksimalkan penerapannya	Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.	Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur	Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan	Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia
Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten	Kurangnya penguasaan Teknologi Informasi (IT) oleh sumber daya aparatur	Dukungan dari stakeholder terkait cukup tinggi terhadap pelaksanaan program/kegiatan	Mutasi sumber daya aparatur yang telah terlatih ke instansi lain	Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional	Perbaikan masalah tata kelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah	Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;	Peningkatan mekanisme Standar Operasional Prosedur yang baik



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2018-2023

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
Tersedianya dukungan sarana prasarana yang memadai	Penyediaan anggaran masih kurang memadai disbanding kebutuhan operasional	Terbukanya dukungan lintas sektor (OPD terkait)	Permasalahan tata kelola dan pembinaan SDM aparatur belum menjadi isu utama dalam perencanaan	Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negera Untuk dalam melaksanakan Tugas kedinasan.	Penyelenggaraan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran	Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui koordinasi terintegrasi
Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana operasional dari pemerintah daerah		Tuntutan peraturan yang kuat akan tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas	Peran Pimpinan belum sepenuhnya maksimal	Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;		Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)	S+T	W+T	S+O	W+O
		Adanya keyakinan yang kuat Pimpinan daerah bahwa keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan salah satu komponen pendukung dalam mensejahterahkan masyarakat				Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Adapun **strategi** dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Prov. Sulsel yaitu:

1. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;
2. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
6. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
7. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional
8. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
9. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia.
10. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik
11. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi
12. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur
13. Perbaikan masalah tatakelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.
14. Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negera dalam melaksanakan Tugas kedinasan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Sedangkan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pelaksanaan program / kegiatan;
2. Meningkatkan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;
3. Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Mengoptimalkani penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Menngkatkan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.
6. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.
7. Melakukan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja
8. Mengoptimalkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;
9. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia.
10. Melakukan penerapan mekanisme Standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
11. Meningkatkan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi
12. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge
13. Melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tatakelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu.
14. Mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negera dalam pelaksanaan Tugas kedinasan.

Hasil analisis di atas dapat dilihat melalui tabel 5.2 dibawah ini.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif ,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	Peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah	Meningkatkan tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	1. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran; 2. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	1. Meningkatkan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran; 2. Mengoptimalkani penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	3. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal. 4. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal. 5. Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional	3. Meningkatkan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal. 4. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal. 5. Melakukan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2018-2023

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif ,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		6. Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan; 7. Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia. 8. Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi 9. Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur 10. Perbaikan masalah tatakelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.	peningkatan kinerja 6. Mengoptimalkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan; 7. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia. 8. Meningkatkan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi 9. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten melalui <i>sharing knowledge</i> 10. Melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tatakelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif ,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatnya akuntabilitias kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan 1. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan; 2. Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Tugas kedinasan. 3. Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik 4. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;	1. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan 2. Mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negera dalam pelaksanaan Tugas kedinasan. 3. Melakukan penerapan mekanisme Standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi 4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pelaksanaan program / kegiatan
MISI : (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter	Meningkatnya bahan pendukung Kebijakan dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama & budaya	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter 1. Peningkatan Kualitas SDM 2. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA 3. Peningkatan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda 4. Peningkatan koordinasi antar stakeholder	Meningkatan Kualitas SDM yang berkarakter 1. Meningkatkan Kualitas SDM 2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA 3. Meningkatkan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda 4. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel diatas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritasasi kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut .



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 5.3

Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan : Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah		
Sasaran :		
1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum 2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa 3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan		
Tahun	Arah Kebijakan	Program
Strategi 1. Peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;		
2021	Meningkatkan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;.	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;.	
2023	Memantapkan peningkatan pelayanan berdasar SOP dengan memperhatikan kondisi sasaran;.	
Strategi 2 Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi		
2021	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	
2023	Memantapkan realisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	
Strategi 3 Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok melalui pendidikan formal maupun non formal.		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tahun	Arah Kebijakan	Program
2021	Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal	
2023	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal	
Strategi 4 Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.		
2021	Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	
2023	Memantapkan penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif bagi ASN baik melalui kegiatan formal maupun non formal.	
Strategi 5 Peningkatan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional		
2021	Melakukan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja	
2023	Memantapkan pembekalan dan pembinaan aparatur dan institusi/lembaga baik terkait program dan teknik operasional dalam rangka peningkatan kinerja	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tahun	Arah Kebijakan	Program
Strategi 6 Optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan		
2021	Mengoptimalkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRITASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;	
2023	Memantapkan peran Lembaga Penelitian dan pengembangan baik dari perangkat daerah yang membidangi maupun dari lembaga pendidikan yang kompeten untuk penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan dan percepatan pembangunan;	
Strategi 7 Pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang tersedia.		
2021	Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia.	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRITASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi pemanfatan secara maksimal sumber daya yang tersedia.	
2023	Memantapkan pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang tersedia.	
Strategi 8 Peningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Koordinasi terintegrasi		
2021	Meningkatkan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRITASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi perningkatan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi	
2023	Pemantapan partisipasi OPD dalam pelaksanaan Pelayanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tahun	Arah Kebijakan	Program
Strategi 9 Penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pedidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge dalam meningkatkan kemampuan SDM aparatur		
2021	Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pedidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pedidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge	
2023	Memantapkan penyelenggaraan kegiatan inovatif, kreatif dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Lembaga pedidikan tinggi yang berkompeten melalui sharing knowledge	
Strategi 10 Perbaikan masalah tatakelola administrasi pemerintahan yang menjadi isu pembangunan daerah.		
2021	Melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tatakelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi melakukan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tatakelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu	
2023	Mewujudkan perbaikan pada masalah dan mengoptimalkan tatakelola administrasi pemerintahan secara efektif dan tepat waktu	
Sasaran : 4. Meningkatnya akuntabiliitas kinerja perangkat daerah		
Strategi 1 : Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;		
2021	Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;	
2023	Memantapkan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan;	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tahun	Arah Kebijakan	Program
Strategi 2 : Optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Tugas kedinasan.		
2021	Mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Tugas kedinasan.	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan	
2023	Memantapkan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan	
Strategi 3 : Peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik		
2021	Meningkatkan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peningkatan mekanisme Standar operasional prosedur yang baik	
2023	Memantapkan akselerasi mekanisme Standar operasional prosedur yang baik	
Strategi 4 : Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;		
2021	Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;	• PROGRAM PENATAAN ORGANISASI, • PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM • PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN • PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2022	Akselerasi peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;	
2023	Memantapkan akselerasi kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan;	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tujuan		
Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter		
Sasaran		
Meningkatnya bahan pendukung Kebijakan dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama & budaya		
Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda		
Tahun	Arah Kebijakan	Program
2021	Meningkatkan Kualitas SDM	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
2022	Akselerasi peningkatan Kualitas SDM	
2023	Memantapkan akselerasi peningkatan Kualitas SDM	
Strategi 2. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA		
2021	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
2022	Akselerasi peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA	
2023	Memantapkan akselerasi koordinasi antar unit kerja di lingkup SETDA	
Strategi 3. Peningkatan Kualitas SDM		
2021	Meningkatkan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
2022	Akselerasi peningkatan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda	
2023	Memantapkan Kualitas Data dalam mendukung administrasi Pemda	
Strategi 4 : Peningkatan koordinasi antar stakeholder		
2021	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
2022	Akselerasi peningkatan koordinasi antar stakeholder	
2023	Memantapkan peningkatan koordinasi antar stakeholder	



BAB VI

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA dan PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab VI ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018-2023 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program
- Sub Kegiatan Perangkat Daerah adalah aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung serangkaian aktivitas pembangunan.
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023 tertuang pada tabel berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama sekretariat daerah	Meningkatnya tata kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Prioritas)	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%		100 %	5.101.664.172	100 %	2.809.861.142	100 %	2.913.100.289	Mendukung pencapaian Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1 dan 2 RPJMD
			4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%		1	1.455.405.424	1	2.080.872.479	1	3.055.772.237	
				Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%		1		1		1		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang- undangan	%	100 % (39 PD)	1	607.442.512	1	880.872.479	1	1.293.565.892	
			4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang- undangan	%		1	284.487.500	1	550.000.000	1	807.677.908	
			4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%		1	563.475.412	1	650.000.000	1	954.528.437	
				Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%		1		1		1		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PD DAN KAB/KOTA		39 PD DAN 24 KAB/KOTA	3.339.288.736	39 PD DAN 24 KAB/KOTA	4.274.496.639	39 PD DAN 24 KAB/KOTA	6.224.362.983	
			4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina	PD		39 PD	956.782.300	39 PD	1.074.496.639	39 PD	1.774.362.983	Mendukung target dan indikator 16 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengembang- an lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat
		Jumlah Kab/Kota yang dibina		kab/kota		24 kab/Kota	24 kab/Kota						
		Jumlah laporan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Laporan		1 Laporan	1 Laporan						
			4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dimonev	PD		39 PD	444.745.512	39 PD	950.000.000	39 PD	1.300.000.000	Mendukung target dan indikator 16 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengembang- an lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat
		Jumlah Kab/Kota yang dimonev		kab/kota		24 kab/Kota	24 kab/Kota						
		Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang disusun		Laporan		1 Laporan	1 Laporan						



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Jumlah peserta coaching clinic SAKIP Perangkat Daerah Provinsi	orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang			
		4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	PD		39 PD	459.017.500	39 PD	750.000.000	39 PD	1.000.000.000		
	Jumlah Kab/Kota yang dibina		kab/kota	24 kab/Kota	24 kab/Kota	24 kab/Kota							
		4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dikelola tatalaksana pemerintahannya	PD		39 PD	371.515.724	39 PD	600.000.000	39 PD	900.000.000		
			Jumlah Kab/Kota yang dibina tatalaksana pemerintahannya	Kab/Kota	24 kab/Kota	24 kab/Kota		24 kab/Kota					
		4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi yg difasilitasi	UPP (Unit Pelayanan Publik)		32 UPP (Unit Pelayanan Publik)	1.107.227.700	32 UPP (Unit Pelayanan Publik)	900.000.000	32 UPP (Unit Pelayanan Publik)	1.250.000.000	Mendukung target dan indikator 16 SDGs Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengembang- kan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi		PD	39 PD	39 PD	39 PD							
	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi		Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota							
	Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik		Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang							



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan hukum	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM (Prioritas)	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundanng- Undangan	Nilai		3	20.289.253.332	4	2.519.640.000	5	2.620.990.000	
				Persentase perkara hukum yang difasilitasi	%		100%		100%		100%		
			Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan	Persentase peraturan daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisia n produk hukum daerah	%		100%	718.965.772		1.493.920.000		1.558.140.000	
			4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase peraturan daerah provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang- undangan	%		100%	305.495.724	100%	613.080.000	100%	627.500.000	
				Persentase peraturan gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang- undangan	%		100%		100%		100%		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase keputusan Gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%		100%	106.629.524	100%	210.000.000	100%	245.000.000	
				Persentase rancangan MoU/Nota Kesepahaman/ Nota Kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%		100%		100%		100%		
			4.01.05.1.01.03 Pendokumentasia n Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan dalam rangka penataan website sesuai standar pengelolaan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH)	%		100%	5.000.000	100%	70.000.000	1	80.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%		100%	301.840.524	100%	600.840.000	1	605.640.000	
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%		100%		100%		1		
			4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara hukum yang ditangani	%		100%	19.570.287.560	1	1.070.000.000	1	1.160.000.000	
			4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Tenaga Ahli Hukum/Konsultan Hukum	%		4 Orang	19.521.630.060	4 Orang	850.000.000	4 Orang	920.000.000	
Persentase perkara litigasi yang difasilitasi	%			100%	100%	100%							



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Perkara Non Litigasi Yang Difasilitasi	%		100%	48.657.500	100%	220.000.000	100%	240.000.000		
			Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam rangka monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	%		100%		100%		100%			
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%		97%	216.986.188.790	98%	260.155.012.305	99%	278.014.313.098		
			Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%		83%		84%		85%			
			Persentase penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	%		0,1		0,1		0			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100%	1.783.093.548	100%	2.287.480.900	100%	2.551.926.840	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen		60	1.121.656.424	60	1.421.827.200	60	1.384.164.340	
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	dokumen		3	88.217.500	4	120.000.000	4	174.800.000	
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	dokumen		3	37.295.000	4	59.000.000	4	93.800.000	
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	dokumen		3	32.868.200	4	49.988.200	4	79.400.000	
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	dokumen		3	32.240.500	4	50.452.500	4	78.750.000	
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	laporan		547	268.222.912	548	334.610.500	548	444.512.500	
			X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		72	134.953.500	72	167.102.500	72	212.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		100%	92.967.397.170	100%	93.158.826.141	100%	93.539.861.54 9	
			X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	bulan		14	91.976.302.146	14	92.076.870.629	14	92.157.785.04 9	
			X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi	dokumen		156	128.786.500	156	128.786.500	156	138.786.500	
			X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang teruji dan terverifikasi	dokumen		2400	231.569.512	2400	238.554.000	2400	248.554.000	
			X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan terkoordinasi	laporan		57	207.344.512	57	193.944.512	57	236.465.500	
			X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	laporan		11	85.759.500	12	113.470.500	12	170.670.500	
			X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen dan pertemuan dalam mengelola bahan tindakanj hasil pemeriksaan	dokumen		9	58.364.500	9	60.044.500	9	80.044.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	laporan		30	210.615.000	30	253.500.000	36	351.500.000	
			X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	laporan		14	68.655.500	17	93.655.500	18	156.055.500	
			X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD SETDA yang tersedia	dokumen		3605	323.133.000	3589	402.633.000	3589	446.633.000	
			X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	laporan		4	60.481.500	6	74.981.500	6	86.981.500	
			X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD /	laporan/		1	10.000.000	2	27.000.000	2	34.400.000	
				Jumlah barang sekretariat daerah yang terinventarisasi	barang		1778	42.362.500	1778	42.362.500	1778	42.362.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		16	42.212.500	16	42.212.500	16	42.212.500	
			X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD /	laporan/		2	10.000.000	5	32.000.000	5	39.400.000	
				Jumlah data hasil rekonsiliasi barang Setda	data		1778	42.686.500	1778	42.686.500	1778	42.686.500	
			X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		13	62.488.500	3	86.488.500	3	101.288.500	
			X.XX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	laporan		13	52.901.500	1	54.901.500	1	57.301.500	
			X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata - rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN			86	1.571.644.524	86	43.108.155.752	86	46.494.046.740	
			X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	pasang		649	459.681.500	649	464.281.500	687	1.031.181.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang diolah /	laporan		607	402.366.524	662	459.618.512	717	585.000.000	
				jumlah pegawai dan non pegawai yang teradministrasi data kepegawaiannya	orang		489	104.683.000	489	104.683.000	489	114.683.000	
			X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti /	laporan		5	50.000.000	14	78.430.000	14	91.400.000	
				jumlah orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	/orang		13	116.643.500	13	116.643.500	13	126.643.500	
			X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang		0	0	230	341.000.000	290	773.000.000	
			X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang		270	438.270.000	630	776.360.500	830	1.495.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor	%		100%	47.401.288.478	100%	47.007.514.450	100%	50.784.411.883	
			X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	jenis		22	77.207.500	22	87.000.000	20	134.358.457	
				Jumlah bulan melakukan penerangan bangunan dan jalan	bulan		12	2.574.379.000	12	2.574.379.000	12	2.674.379.000	
			X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit		116	2.005.889.300	83	809.541.000	95	1.042.215.700	
				jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis		17	1.642.347.000	17	1.642.347.000	17	1.742.347.000	
			X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang telah tersedia	unit		15	67.236.000	20	124.390.755	20	200.400.000	
				jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis		21	1.509.689.500	21	1.509.689.500	21	1.609.689.500	
			X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis		15	4.605.000	15	7.500.000	15	7.500.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis		41	416.808.000	41	531.999.245	41	726.875.725	
			X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang		325	118.173.000	525	290.000.000	665	380.000.000	
				jumlah acara kegiatan pemprov sulsel yang terfasilitasi	acara		1180	25.798.626.340	1180	25.798.626.340	1180	26.798.626.340	
			X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas	kali		1933	11.861.563.924	2097	12.148.228.110	2457	13.239.206.661	
			X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahakan	jenis		0	0	4	85.000.000	4	100.000.000	
				jumlah arsip yang tertata	arsip		19179	68.813.500	20779	68.813.500	20879	98.813.500	
			X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD	jenis		2	160.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	
			X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		100%	21.124.588.914	100%	20.989.361.500	100%	23.717.361.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan	unit		8	2.274.410.500	7	2.260.410.500	10	3.186.410.500	
			X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang telah diadakan	unit		2	1.899.410.500	2	1.899.410.500	2	1.999.410.500	
			X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang telah diadakan	unit		28	349.090.000	23	137.990.000	26	211.990.000	
				jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	jenis		6	5.108.832.500	6	5.108.832.500	6	5.908.832.500	
			X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang telah diadakan	unit		7	68.881.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
			X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan	aplikasi		3	385.296.000	3	290.000.000	3	338.000.000	
			X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit / jenis		2	9.008.609.500	2	9.008.609.500	2	9.008.609.500	
			X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah diadakan	unit		98	2.030.058.914	111	2.184.108.500	141	2.964.108.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		100%	11.180.803.234	100%	11.592.640.932	100%	12.467.621.956	
			X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	buah		20523	678.934.996	20723	686.244.596	20923	700.244.596	
				jumlah jasa pengelola surat	orang		1	37.990.512	1	50.000.000	1	75.000.000	
			X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia	jenis		2	11.751.586	2	17.500.000	2	17.500.000	
				Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik	bulan		12	7.584.182.704	12	7.584.182.704	12	7.984.182.704	
			X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia	jenis		4	274.210.500	4	274.210.500	4	374.210.500	
			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	orang		58	2.593.732.936	60	2.980.503.132	68	3.316.484.156	
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%		100%	10.370.176.746	100%	10.728.605.722	100%	11.832.655.722	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	unit		71	2.928.291.524	71	3.095.816.500	72	3.210.786.500	
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak perizinan kendaraan	unit		62	4.991.350.500	62	4.997.658.500	64	5.388.138.500	
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara/direhabili tasi	unit		53	402.918.500	64	430.110.500	70	891.110.500	
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit		0	15.000.000	1	28.000.000	1	31.600.000	
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	unit		2	116.271.000	2	170.000.000	2	194.000.000	
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabili tasi	unit		12	1.344.510.222	11	1.450.410.222	11	1.510.410.222	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direhabili tasi	unit		27	571.835.000	57	556.610.000	87	606.610.000	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan	X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional KDH- WKDH yang tersedia	dokumen		64	7.833.413.908	64	7.833.413.908	64	8.483.413.908	
			X.XX.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan KDH- WKDH	bulan		14	243.601.812	14	243.601.812	14	293.601.812	
			X.XX.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah setelan pakaian dinas KDH- WKDH beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	pasang		26	272.660.500	26	272.660.500	26	372.660.500	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan KDH- WKDH melakukan medical check up	bulan		12	0	12	0	12	0	
			X.XX.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pembayaran penunjang operasional KDH- WKDH	bulan		12	7.317.151.596	12	7.317.151.596	12	7.817.151.596	
			X.XX.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kerumah tanggaan sekretariat daerah yang tersedia	dokumen		1080	17.546.380.000	1080	17.546.380.000	1080	20.246.380.000	
			X.XX.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terlayani	daftar		360	8.467.706.600	360	8.467.706.600	360	9.367.706.600	
			X.XX.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terlayani	daftar		360	5.318.782.400	360	5.318.782.400	360	6.218.782.400	
			X.XX.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terlayani	daftar		360	3.759.891.000	360	3.759.891.000	360	4.659.891.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			X.XX.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Layanan (Materi, Komunikasi, Dokumentasi) Pimpinan	%		100%	2.792.644.876	100%	2.950.000.000	100%	3.750.000.000	
			X.XX.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Materi Pimpinan Yang Disusun	materi		120 Materi	400.001.052	150 Materi	500.000.000	200 Materi	800.000.000	
			X.XX.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Komunikasi Pimpinan Yang Tersedia	bahan		335 Bahan	576.529.828	400 Bahan	600.000.000	500 Bahan	850.000.000	
			X.XX.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang Didokumentasikan	dokument asi		1800 Dokument asi	1.816.113.996	1900 Dokument asi	1.850.000.000	2000 Dokument asi	2.100.000.000	
			X.XX.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Layanan Keprotokolan	jenis		3 Jenis	2.091.624.392	3 Jenis	2.550.000.000	3 Jenis	3.700.000.000	
			X.XX.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang difasilitasi	acara/kegi atan		1800 Acara/Keg iatan	1.205.759.392	1900 Acara/Keg iatan	1.500.000.000	1900 Acara/Keg iatan	2.200.000.000	
			X.XX.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	tamu		750 Tamu	583.440.000	800 Tamu	650.000.000	850 Tamu	850.000.000	
			X.XX.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang dikoordinasikan	acara/kegi atan		1800 Acara/Keg iatan	302.425.000	1900 Acara/Keg iatan	400.000.000	2000 Acara/Keg iatan	650.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan hukum	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%		100	1.407.658.044	100	1.540.000.000	100	4.414.749.062	
	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	%		100	591.432.860	100	680.000.000	100	3.014.749.062		
	4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	dokumen		2	310.472.024	2	330.000.000	2	400.000.000		
			Jumlah LPPD Yang Dihasilkan	dokumen		2		2		2			
	4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab / Kota	dokumen		1	233.077.324	1	250.000.000	1	300.000.000		
		Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	dokumen		1	1		1					



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah usulan Batas Wilayah Kab/ Kota yang difasilitasi	kab/kota		2 kab/kota	47.883.512	4 Kab/Kota	100.000.000	8 Kab/Kota	2.314.749.062	
			4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase Kab/Kota Yang terfasilitasi, monitoring dan evaluasi	%		100	501.904.172	100	525.000.000	100	950.000.000	
			4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakilkota dan Wakil Walikota	sk		12	326.417.324	1	200.000.000	12	450.000.000	
		Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota		sk		10	12		14				
		Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH		sk		12	1		12				
			4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	kab/kota		24	83.522.024	24	150.000.000	24	200.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	kab/kota		24	91.964.824	24	175.000.000	24	300.000.000	
				Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kab/kota		24		24		24		
			4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama Daerah Yang terfasilitasi	%		100	314.321.012	100	335.000.000	100	450.000.000	
			4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	MoU/PKS		50	182.971.012	75	200.000.000	100 MoU/PKS	250.000.000	
			4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	MoU/PKS		50	61.769.500	75	65.000.000	100 MoU/PKS	100.000.000	
			4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Monitoring Tindak Lanjut MoU/PKS	MoU/PKS		50	69.580.500	75	70.000.000	100 MoU/PKS	100.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatnya Tata Kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang/jasa.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%		100%	4.331.982.412,0 0	100%	3.333.926.941,5 4	100%	3.435.381.528 ,25	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	% rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian	%		100%	3.738.330.912,0 0	100%	1.893.926.941,5 4	100%	2.265.381.528 ,25	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti)			Prov. Sulsel	2.612.599.112,0 0	24 kab/kota/ 4 kali	1.040.126.941,5 4	24 kab/kota/ 4 kali	1.141.898.800 ,00	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan ekonomi makro			Prov. Sulsel	1.125.731.800,0 0	24 kab/kota	853.800.000,00	24 kab/kota	1.123.482.728 ,25	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	% rekomendasi kebijakan sumber daya alam	%		100%	544.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	280.000.000,0 0	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan			24 kab/kota	544.000.000,00	24 kab/kota	130.000.000,00	24 kab/kota	80.000.000,00	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertambangan dan lingkungan hidup			24 kab/kota		24 kab/kota	100.000.000,00	24 kab/kota	100.000.000,00	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Energi dan air			24 kab/kota		24 kab/kota	100.000.000,00	24 kab/kota	100.000.000,00	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	% rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD	%		100%	49.651.500,00	100%	1.110.000.000,00	100%	890.000.000,00	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			24 kab/kota	49.651.500,00	24 kab/kota	300.000.000,00	24 kab/kota	200.000.000,00	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi					24 kab/kota	280.000.000,00	24 kab/kota	160.000.000,0 0	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Rencana Badan Usaha Milik Daerah yang difasilitasi					24 kab/kota	300.000.000,00	24 kab/kota	300.000.000,0 0	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah BLUD yang dimonitoring dan evaluasi					24 kab/kota	130.000.000,00	24 kab/kota	130.000.000,0 0	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Rumah Sakit yang difasilitasi menjadi BLUD					24 kab/kota	100.000.000,00	24 kab/kota	100.000.000,0 0	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%		100%	174.008.100,00	100%	1.067.929.600,0 0	100%	875.168.046,0 0	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber APBN dan APBD	%		100%	132.705.200,00	100%	578.569.600,00	100%	379.430.100,0 0	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan pembangunan APBD			12 Laporan	41.318.400,00	12 Laporan	308.789.500,00	12 Laporan	209.650.000,00	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan pembangunan APBN			4 Laporan	41.302.900,00	4 Laporan	269.780.100,00	4 Laporan	169.780.100,00	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan pembangunan Wilayah				50.083.900,00					
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD dan APBN	100%		100%	41.302.900,00	100%	489.360.000,00	100%	495.737.946,00	
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			4 Laporan		4 Laporan	165.500.000	4 Laporan	165.199.500	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			4 Dokumen	41.302.900,00	4 Dokumen	175.500.000	4 Dokumen	180.178.446	
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi perumusan Kebijakan Teknis pembangunan daerah			1 Kali		1 Kali	148.360.000,00	1 Kali	150.360.000,00	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					Rp 8.751.593.800		Rp 10.501.912.560		Rp 12.602.295.07 2	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Rp 4.001.593.800		Rp 4.801.912.560		Rp 5.762.295.072	
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ	laporan		4 Laporan	488.296.900,00	4 Laporan	Rp 488.296.900		Rp 488.296.900	
				Jumlah Laporan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ 24 Kab/kota	laporan								
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibina	orang		35 Orang	1.925.000.000,0 0	35 Orang	Rp 1.925.000.000		Rp 1.925.000.000	
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi	kali		7 Kali	250.000.000,00	12 Kali	Rp 250.000.000		Rp 250.000.000	
				Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa	orang		142 Orang	500.000.000,00	200 Orang	Rp 500.000.000		Rp 500.000.000	
				Jumlah Fasilitas Layanan Pendampingan	kali		2 Kali	350.000.000,00	4 Kali	Rp 350.000.000		Rp 350.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp 3.300.000.000		Rp 3.960.000.000		Rp 4.752.000.000	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender yang diproses melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa	paket		410 Paket	2.500.000.000	450 Paket	Rp 3.000.000.000		Rp 3.600.000.000				
	Jumlah Dokumen RPP yang difasilitasi Penyusunannya	dokumen		75 Dokumen		120 Dokumen							
	Jumlah Produk yang dikelola dalam Katalog Lokal	produk		2 Produk		4 Produk							
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	laporan		12 Laporan	400.000.000,00	12 Laporan	Rp 480.000.000		Rp 576.000.000				
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diinventarisir	paket		10.000 Paket	400.000.000,00	14.000 Paket	Rp 480.000.000		Rp 576.000.000				
	Jumlah Laporan Hasil Riset dan Analisis Pasar	laporan		1 Laporan		2 Laporan	Rp -						



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi strategi Pengadaan Barang / Jasa	kab/kota		6 Kab/Kota		24 Kab/Kota	Rp -			
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					Rp 1.450.000.000		Rp 1.740.000.000		Rp 2.088.000.000	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota	laporan		4 Laporan	400.000.000	4 Laporan	Rp 400.000.000	24 Kab/Kota	Rp 400.000.000	
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	laporan		12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	Rp 250.000.000	2 Inovasi PP	Rp 250.000.000	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Kontrak	laporan		2 Laporan	250.000.000	12 Laporan	Rp 250.000.000	2 Inovasi PP	Rp 250.000.000	
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau NonPemerintah	laporan		3 laporan	250.000.000	3 laporan	Rp 250.000.000	3 laporan	Rp 250.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	aplikasi		2 Aplikasi	300.000.000	3 Aplikasi	Rp 300.000.000	24 Kab/Kota	Rp 300.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pengembangan sistem informasi/aplikasi	kab/kota		6 Kab./Kota	200.000.000	24 Kab./Kota	Rp 200.000.000	39 PD	Rp 200.000.000	
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau NonPemerintah	laporan		3 laporan	200.000.000	3 laporan	Rp 200.000.000	24 laporan	Rp 200.000.000	
Pembanguna n manusia yang kompetitif dan inklusif.	Meningkatkan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter	Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dihasilkan	dokumen		9	1.225.599.005.1 12	9	1.226.360.302.3 19	9	1.228.670.302 .319	
				Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	persen	36,67%	35,25%				35,50%		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Persen Penurunan Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	persen	371 kasus	10,00%		10,00%		10,00%		
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	% kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan	%		100%	30.790.138.512	100%	30.790.302.319	100%	32.040.720.00 0	
			Pengelolaan sarana dan Prasarana Spritual	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sarana dan prasarana spritual yang dimanfaatkan	%		100%	13.448.000	100%	13.611.807	100%	50.000.000	
				Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana spritual	%		100%	290.710.512	100%	290.710.512	100%	350.000.000	
				% permohonan hibah sarana dan prasarana spritual yang ditindaklanjuti	%		100%	19.307.000.000	100%	19.307.000.000	100%	19.607.000.00 0	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kelembagaan bina spritual yang dimanfaatkan	%		100%	45.260.000	100%	45.260.000	100%	100.000.000	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan bina spritual	%		100%	2.083.720.000	100%	2.083.720.000	100%	2.383.720.000	
				persen permohonan bantuan hibah lembaga bina spritual yang ditindaklanjuti	%		100%	9.050.000.000	100%	9.050.000.000	100%	9.550.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%		100%	1.194.748.576.900	100%	1.195.430.000.000	100%	1.196.179.582.319	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang pendidikan yang dimanfaatkan	%		100%	7.070.400	100%	10.000.000	100%	50.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Rakyat Bidang Pendidikan	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan	%		100%	6.520.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000		
			% Dana Hibah Pendidikan yang disalurkan	%		100%	1.194.647.500.000	100%	1.195.000.000.000	100%	1.195.079.582.319		
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kesehatan yang dimanfaatkan	%		100%	7.070.400	100%	10.000.000	100%	50.000.000	
			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan	%		100%	6.520.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000		
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum yang dimanfaatkan	%		100%	7.086.400	100%	10.000.000	100%	50.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Sosial	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum	%		100%	6.520.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%		100%	60.289.700	100%	140.000.000	100%	450.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimanfaatkan	%		100%	7.288.900	100%	10.000.000	100%	50.000.000	
				% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	%		100%	25.720.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja yang dimanfaatkan	%		100%	7.070.400	100%	10.000.000	100%	50.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja	%		100%	6.520.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

Misi	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Realisasi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterkaitan Kegiatan Prioritas Gub./SPM/SD Gs
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan yang dimanfaatkan	%		100%	7.070.400	100%	10.000.000	100%	50.000.000	
				Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan	%		100%	6.620.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pada bagian ini yang menjadi titik berat adalah indikator kinerja unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan ukuran atas keberhasilan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro. Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Sekretariat Daerah yang masuk dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 Mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka menetapkan 3 sasaran dengan indikator sasaran seperti pada tabel 7.2.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan tetap waktu / Jumlah Rancangan Produk Hukum yang ada x100%
		Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah data/informasi yang dimanfaatkan/ Jumlah data/informasi yang tersedia x 100%
		Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur / Jumlah Paket yang akan ditender dalam RUP x 100 %



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN
2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Provinsi SulSel	Biro Organisasi	Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>90-100) adalah sangat memuaskan A (>80-90) adalah memuaskan BB (>70-80) adalah sangat baik B (>60-70) adalah baik CC (>50-60) adalah cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Biro Umum	Nilai Indeks Kepuasan Layanan 0 – 20 Kurang Puas 21-- 40 Sedikit Puas 41-- 60 cukup Puas 61-- 80 Puas 81-- 100 Sangat Puas
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Biro Administrasi Pimpinan	Nilai Indeks Kepuasan Layanan 0 – 20 Kurang Puas 21-- 40 Sedikit Puas 41-- 60 cukup Puas 61-- 80 Puas 81-- 100 Sangat Puas
4.	Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah data/informasi yang dimanfaatkan/ Jumlah data/informasi bidang kesra yang tersedia x 100%



Tabel 7.2.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung oleh Sekretariat Daerah

Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi dari B (73) menjadi A (80)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Indikator : Nilai SAKIP Provinsi dari B (73) menjadi A (80)	1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rakyat dan Hukum Indikator : a. Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri b. Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesrayang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan c. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu 2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa Indikator : a. Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan b. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur 3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

		kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan Indikator : a. Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi SulSel b. Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan c. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4. Meningkatnya bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama & Budaya Indikator : Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan

Indikator Kinerja harus dapat terukur (SMART) dan serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah selesainya pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD. Sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam tabel 7.2 (T.C. 28)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 7.3 (t.c. 28)

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	BIRO PEMERINTAHAN							
	Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	%	100	100	-	-	-	100
	Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah	%	80	80	-	-	-	100
	Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota	%	80	80	-	-	-	100
	Cakupan Fasilitas Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota	%	100	100	-	-	-	100
	Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah	%	100 %	100 %	-	-	-	100
	Peningkatan jumlah kerjasama daerah	MoU/PKS	18	20	-	-	-	263
	% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi	%	80	100	-	-	-	100
	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	80	100	-	-	-	100
	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	80	100	-	-	-	100
	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	80	100	-	-	-	100
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	97	98	99	100
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	-	-	83	84	85	85



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	-	-	2	1	0	100
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Jumlah Peserta Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	%	-	-	100	100	100	100
	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	dokumen	-	-	2	2	2	2
	Jumlah LPPD Yang Dihasilkan	dokumen	-	-	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab / Kota	dokumen	-	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	dokumen	-	-	1	1	1	1



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** **TAHUN 2018-2023**

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah usulan Batas Wilayah Kab/ Kota yang difasilitasi	kab/kota	-	-	2	4	8	8
	Presentase Kab/Kota Yang terfasilitasi, monitoring dan evaluasi	%	-	-	100	100	100	100
	Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakil kota dan Wakil Walikota	sk	-	-	12	12	12	12
	Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota	sk	-	-	10	12	14	14
	Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH	sk	-	-	12	1	12	12
	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	kab/kota	-	-	24	24	24	24
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	kab/kota	-	-	24	24	24	24
	Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kab/kota	-	-	24	24	24	24
	Presentase Kerjasama Daerah Yang terfasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	MoU/PKS	-	-	50	75	100	100
	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	MoU/PKS	-	-	50	75	100	100
	Monitoring Tindak Lanjut MoU/PKS	MoU/PKS	-	-	50	75	100	100
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	20	20	-	-	-	100
	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	20	20	-	-	-	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	20	20	-	-	-	100
	% ASN berkinerja sangat baik	%	20	20	-	-	-	100
	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	%	-	-	-	-	-	1
	% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas)	%	10	10	-	-	-	86,36
	% Penurunan Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	%	10	10	-	-	-	50
	% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	%	20	20	-	-	-	100
	% Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya	%	20	20	-	-	-	100
	% Pelaksaaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial	%	20	20	-	-	-	100
	% Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	%	20	20	-	-	-	100
	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dihasilkan	dokumen	-	-	9	9	9	9
	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	-	-	35,25	35,5	35,75	35,75
	Persen Penurunan Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	%	-	-	10	10	10	10



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	% kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sarana dan prasarana spritual yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana spritual	%	-	-	100	100	100	100
	% permohonan hibah sarana dan prasarana spritual yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kelembagaan bina spritual yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan bina spritual	%	-	-	100	100	100	100
	persen permohonan bantuan hibah lembaga bina spritual yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100
	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang pendidikan yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan	%	-	-	100	100	100	100
	% Dana Hibah Pendidikan yang disalurkan	%	-	-	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kesehatan yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum	%	-	-	100	100	100	100
	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	100
BIRO HUKUM								
	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	100	-	-	-	100
	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100	-	-	-	100
	Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi	Perda	12	12	-	-	-	24 Perda
	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Perda	50	50	-	-	-	100 Perda
	% LHP aparat fungsional prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti	100 %	100	101	-	-	-	100%
	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Jenis	2	2	-	-	-	2 Jenis
	Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgu b, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	100 %	100	100	-	-	-	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	97	98%	99%	100
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%			83%	84%	85%	100
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%			2%	1%	0%	100
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	-	-	100	100	100	100
	Rata - rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%	-	-	98	98	98	98
	% Pemenuhan administrasi umum kantor	%	-	-	100	100	100	100
	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	100	100	100	100
	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	100	100	100	100
	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	-	-	100	100	100	100
	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai	-	-	3	4	5	5
	Persentase perkara hukum yang difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase peraturan daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase peraturan daerah provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase peraturan gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase keputusan Gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase rancangan MoU/Nota Kesepahaman/ Nota Kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan dalam rangka penataan website sesuai standar pengelolaan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH)	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Perkara hukum yang ditangani	%	-	-	100	100	100	100
	Jumlah Tenaga Ahli Hukum/Konsultan Hukum	%	-	-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
	Persentase perkara litigasi yang difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Perkara Non Litigasi Yang Difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam rangka monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	%	-	-	100	100	100	100
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	% rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100	
	% rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti)	Kab/Kota	-	-	Prov. Sulsel	24 kab/kota/ 4 kali	24 kab/kota / 4 kali	
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan ekonomi makro	Kab/Kota	-	-	Prov. Sulsel	24	24	
	% rekomendasi kebijakan sumber daya alam	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	-	-	24	24	24	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	Kab/Kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Energi dan air	Kab/Kota	-	-	24	24	24	
	% rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kab/Kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kab/Kota	-	-	-	24	24	
	Jumlah Rencana Badan Usaha Milik Daerah yang difasilitasi	Kab/Kota	-	-	-	24	24	
	Jumlah BLUD yang dimonitoring dan evaluasi	Kab/Kota	-	-	-	24	24	
	Jumlah Rumah Sakit yang difasilitasi menjadi BLUD	Kab/Kota	-	-	-	24	24	
	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	-	-	100	100	100	
	Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber APBN dan APBD	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan APBD	laporan	-	-	12	12	12	
	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan APBN	laporan	-	-	4	4	4	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD dan APBN	100%	-	-	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	-	-	4	4	4	
	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	-	-	4	4	4	
	Jumlah Fasilitasi perumusan Kebijakan Teknis pembangunan daerah	Kali	-	-	1	1	1	
	Rata-rata Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	
	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah	Dokumen	-	-	4	4	4	
	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jenis	-	-	2	2	2	
	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kali	-	-	40	45	45	
	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kali	-	-	40	45	45	
	Jumlah Kendaraan Jabatan/Dinas Yang Dipelihara	Kendaraan	-	-	10	10	10	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	-	10	10	10	
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA							
	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ	laporan	-	-	4	4		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Laporan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ 24 Kab/kota	laporan	-	-	4	4		
	Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibina	orang	-	-	35	35		
	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi	kali	-	-	7	12		
	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa	orang	-	-	142	200		
	Jumlah Fasilitas Layanan Pendampingan	kali	-	-	2	4		
	Jumlah Paket Tender yang diproses melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa	paket	-	-	410	450		
	Jumlah Dokumen RPP yang difasilitasi Penyusunannya	dokumen	-	-	75	120		
	Jumlah Produk yang dikelola dalam Katalog Lokal	produk	-	-	2	4		
	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	laporan	-	-	12	12		
	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diinventarisir	paket	-	-	10000	14000		
	Jumlah Laporan Hasil Riset dan Analisis Pasar	laporan	-	-	1	2		
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi strategi Pengadaan Barang / Jasa	kab/kota	-	-	6	24		
	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota	laporan	-	-	4	4	24 Kab/Kota	
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	laporan	-	-	12	12	2 Inovasi PP	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Kontrak	laporan	-	-	2	12	2 Inovasi PP	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau NonPemerintah	laporan	-	-	3	3	3 laporan	
	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	aplikasi	-	-	2	3	24 Kab/Kota	
	Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pengembangan sistem informasi/aplikasi	kab/kota	-	-	6	24	39 PD	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau NonPemerintah	laporan	-	-	3	3	24	
	% Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	-	100	-	-	-	100
	% Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran	%	-	100	-	-	-	100
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	-	-	100	100	100	100
	Prosentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan rencana	%	-	-	100	100	100	100
	Prosentase Kepuasan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	%	-	-	100	100	100	100
	BIRO ORGANISASI							
	Persentase pemenuhan administrasi	%	100	100	-	-	-	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	perkantoran							
	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100	-	-	-	
	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	100	100	-	-	-	
	Persentase ASN berkinerja sangat baik	%	100	-	-	-	-	
	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	-	-	100	100	100	
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%	-	-	100	100	100	
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	
	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%	-	-	100	100	100	
	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	%	-	-	100	100	100	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PD DAN KAB/KOTA	-	-	39 PD DAN 24 KAB/ KOTA	39 PD DAN 24 KAB/ KOTA	39 PD DAN 24 KAB/ KOTA	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina	PD	-	-	39	39	39	
	Jumlah Kab/Kota yang dibina	kab/kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah laporan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan	-	-	1	1	1	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dimonev	PD	-	-	39	39	39	
	Jumlah Kab/Kota yang dimonev	kab/kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang disusun	Laporan	-	-	1	1	1	
	Jumlah peserta coaching clinic SAKIP Perangkat Daerah Provinsi	orang	-	-	150	150	150	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	PD	-	-	39	39	39	
	Jumlah Kab/Kota yang dibina	kab/kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah perangkat daerah yang dikelola tatalaksana pemerintahannya	PD	-	-	39	39	39	
	Jumlah Kab/Kota yang dibina tatalaksana pemerintahannya	Kab/Kota	-	-	24	24	24	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi yg difasilitasi	UPP (Unit Pelayanan Publik)	-	-	32	32	32	
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi	PD	-	-	39	39	39	
	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	Kab/Kota	-	-	24	24	24	
	Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik	Orang	-	-	50	50	50	
	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	97	98	99	100
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	-	-	83	84	85	85
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	-	-	2	1	0	100
	BIRO UMUM							
	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
	% ASN berkinerja sangat baik	%	0	100	100	100	100	100
	Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola	Jenis	20	20	20	20	20	20
	Cakupan jumlah pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Pelayanan	2140	2150	2.160	2.160	2.160	2160
	Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola	Unit	1048	1058	1.068	1.068	1.068	1068



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen	15125	15205	15.295	15.295	15.295	15295
	Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan	11414	11534	11.654	11.654	11.654	11654
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen (%)	-	-	90	90	90	90
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Persen (%)	-	-	93	93	93	93
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	Persen (%)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	-	-	32	32	32	32
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	dokumen	-	-	531	531	531	531
	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	-	-	100	100	100	100
	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	bulan	-	-	14	14	14	14
	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi	dokumen	-	-	156	156	156	156
	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang teruji dan terverifikasi	Dokumen	-	-	2.388	2.388	2.388	2388



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan terkoordinasi	laporan	-	-	32	32	32	32
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan	-	-	9	9	9	9
	Jumlah dokumen dan pertemuan dalam mengelola bahan tindaklanjut hasil pemeriksaan	dokumen	-	-	8	8	8	8
	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	laporan	-	-	13	13	13	13
	Jumlah dokumen administrasi BMD SETDA yang tersedia	dokumen	-	-	3.587	3.578	3.578	1.783
	Jumlah laporan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	laporan/	-	-	1	2	2	2
	Jumlah barang sekretariat daerah yang terinventarisasi	barang	-	-	1.778	1.778	1.778	1778
	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	-	16	16	16	16
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD /	laporan/	-	-	2	5	5	5
	Jumlah data hasil rekonsiliasi barang Setda	data	-	-	1.778	1.778	1.778	1.778
	Jumlah laporan pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	-	-	13	1	1	12
	Rata - rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN		-	-	85	85	85	85
	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	Pasang	-	-	528	528	528	528



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah data administrasi kepegawaian yang diolah /	laporan	-	-	607	662	717	717
	jumlah pegawai dan non pegawai yang teradministrasi data kepegawaianya	orang			489	489	489	489
	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti /	laporan			5	14	14	14
	jumlah orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	/orang	-	-	13	13	13	13
	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi	orang	-	-	20	20	20	20
	% Pemenuhan administrasi umum kantor	Persen	-	-	100	100	100	100
	Jumlah bulan melakukan penerangan bagunan dan jalan	bulan	-	-	12	12	12	12
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	-	-	17	17	17	17
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	-	-	21	21	21	21
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	-	-	12	12	12	12
	Jumlah acara kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terfasilitasi oleh biro umum	acara	-	-	1.180	1.180	1.180	1180
	Jumlah perjalanan dinas	kali	-	-	782	782	782	782
	Jumlah arsip yang tertata	arsip	-	-	19.179	19.179	19.179	19179
	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan	unit	-	-	5	5	5	5
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang telah diadakan	unit	-	-	2	2	2	2
	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	jenis	-	-	6	6	6	6
	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit / jenis	-	-	2	2	2	2
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah diadakan	gedung	-	-	4	4	4	4
	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	100	100	100	100
	Jumlah surat yang dikelola	surat	-	-	12.785	12.785	12.785	12785
	Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik	bulan	-	-	12	12	12	12
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia	jenis	-	-	4	4	4	4
	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Persen	-	-	90	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	-	-	20	20	20	20
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak perizinan kendaraan	unit	-	-	39	39	39	39
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	unit	-	-	4	4	4	4



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi	unit	-	-	6	6	6	6
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direhabilitasi	unit'	-	-	4	4	4	4
	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang tersedia	dokumen	-	-	64	64	64	-
	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan KDH-WKDH	bulan	-	-	14	14	14	14
	Jumlah setelan pakaian dinas KDH-WKDH beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	pasang	-	-	26	26	26	26
	Jumlah bulan KDH-WKDH melakukan medical check up	bulan	-	-	12	12	12	12
	Jumlah bulan pembayaran penunjang operasional KDH-WKDH	bulan	-	-	12	12	12	12
	Jumlah dokumen administrasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang tersedia	dokumen	-	-	1.080	1.080	1.080	-
	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terlayani	daftar	-	-	360	360	360	360
	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terlayani	daftar	-	-	360	360	360	360
	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terlayani	daftar	-	-	360	360	360	360
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat 0Daerah	%	-	-	97%	98%	99%	100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	-	-	83%	84%	85%	85%
	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	-	-	0,02	0,01	0,00	100%
	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	-	100	-	-	-	100%
	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	-	100	-	-	-	100%
	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	-	100	-	-	-	100%
	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	-	100 %	-	-	-	100%
	Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa		-	-	-	-	-	
	Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah	3 Jenis		100	-	-	-	3
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100%
	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	-	-	100	100	100	100%
	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	%	-	-	98	98	98	100%
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	-	-	100	100	100	100%
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	100	100	100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No.	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	100	100	100%
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	-	-	100	100	100	100%
	Cakupan Layanan (Materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan Yang Tersedia	%	-	-	100	100	100	100%
	Jumlah Materi Pimpinan Yang Disusun	materi	-	-	120	150	200	200
	Jumlah Bahan Komunikasi Pimpinan Yang Tersedia	bahan	-	-	335	400	500	500
	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang Didokumentasikan	dokumentasi	-	-	1800	1900	2000	2000
	Cakupan Layanan Keprotokolan	Jenis	-	-	3	3	3	3
	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang difasilitasi	acara/kegiatan	-	-	1800	1900	1900	1900
	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	tamu	-	-	750	800	850	850
	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan Yang dikoordinasikan	acara/kegiatan	-	-	1800	1900	2000	2000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

Tabel 7.4. (T-C.28)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hasil Penilaian LPPD Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Persentase MoU/Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelesaian Batas Wilayah yang ditindaklanjuti		8,30%	11,70%	21,70%	28,30%	30%	8,30%
4	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
9	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi SulSel		64,28 (B)	70,00 (BB)	76,00 (BB)	80,00 (A)	85,00 (A)	85,00 (A)
10	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi		61,24 (B)	70,00 (B)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
11	Persentase layanan (materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan yang di tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
12	Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)
13	Indeks pelayanan Keuangan lingkup Sekretariat Daerah yang tepat waktu		70 (puas)	75 (puas)	80 (puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	90 (sangat puas)
14	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		75 (Puas)	80 (Puas)	85 (sangat puas)	90 (sangat puas)	95(sangat puas)	95(sangat puas)
15	Persentase layanan (materi, Komunikasi dan Dokumentasi) Pimpinan yang di tersedia		100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Nilai SAKIP OPD		55 {CC)	61 (B)	71 (BB)	81 (A)	91 (AA)	91 (AA)
17	Presentase ASN Nilai SKP Kategori BAIK		81%	82%	83%	84%	85%	85%
18	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah		95%	96%	97%	98%	99%	99%
19	Persentase temuan material		0,03	0,02	0,01	0,01	0	0
20	Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2018-2023

Dari 20 indikator terdapat 8 unit kerja biro yang melaksankannya dalam rangka mewujudkan capaian sasaran indikator kinerja Sekretaris Daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya.
2. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
3. Sasaran strategis Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikoordinasikan oleh para Eselon II sebagai penanggung jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
5. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik terintegrasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan